

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI MALUKU





PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI MALUKU





Peta Pembinaan Provinsi Maluku

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Laili Isna Nur Khiqmah, S.Si
2. Maria Herlina, M.Si

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN BURU	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN BURU SELATAN	13
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN KEPULAUAN ARU	22
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	22
Aspek Satuan Inovasi Daerah	23
D. KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	29
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	29
Aspek Satuan Inovasi Daerah	30
E. KABUPATEN MALUKU TENGAH	39
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	40
Aspek Satuan Inovasi Daerah	41
F. KABUPATEN MALUKU TENGGARA	47
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	47
Aspek Satuan Inovasi Daerah	48
G. KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	55
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	56
Aspek Satuan Inovasi Daerah	57
H. KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	62
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	63
Aspek Satuan Inovasi Daerah	64
I. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	70
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	70
Aspek Satuan Inovasi Daerah	71
J. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR ULU	78
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	79
Aspek Satuan Inovasi Daerah	80

K. KOTA AMBON	87
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	87
Aspek Satuan Inovasi Daerah	88
L. KOTA TUAL	96
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	97
Aspek Satuan Inovasi Daerah	97
M. PROVINSI AMBON	104
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	104
Aspek Satuan Inovasi Daerah	105

BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Buru
- Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Buru
- Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Buru
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Buru
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Buru
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Buru
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Buru
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Buru
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Buru
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buru
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Buru Selatan
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Buru Selatan
- Gambar 14. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru
- Gambar 15. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Aru
- Gambar 17. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Aru
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Buru Selatan
- Gambar 19. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kepulauan Aru
- Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada

Kabupaten Kepulauan Aru

Gambar 21. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kepulauan Aru

Gambar 22. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kepulauan Aru

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiasi/Inovasi pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Seram Barat

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Seram Bagian Barat

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Seram Timur

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Seram Bagian Timur

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar 87. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kota Ambon

Gambar 88. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Ambon

Gambar 89. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Ambon

Gambar 90. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Ambon

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Ambon

Gambar 92. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Kota Ambon

Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Ambon

Gambar 94. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Ambon

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Ambon

Gambar 96. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Ambon

Gambar 97. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 98. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kota Tual
Gambar 99. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tual
Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku
Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku
Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Maluku
Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Maluku
Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Maluku
Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Provinsi Maluku
Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Provinsi Maluku
Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Maluku
Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Maluku
Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku
Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah
- Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Buru
- Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Aru
- Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Barat Daya
- Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tengah
- Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara
- Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Seram Bagian Barat
- Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Seram Bagian Timur
- Tabel 10. Daftar Inovasi Kota Ambon
- Tabel 11. Daftar Inovasi Provinsi Maluku

The Page Left is Blank



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi di atas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelebagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Maluku. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon dan Kota Tual.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Maluku yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek

Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Aspek	Variabel	Indikator
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
		Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian
	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	
	Roadmap SiDA	
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan

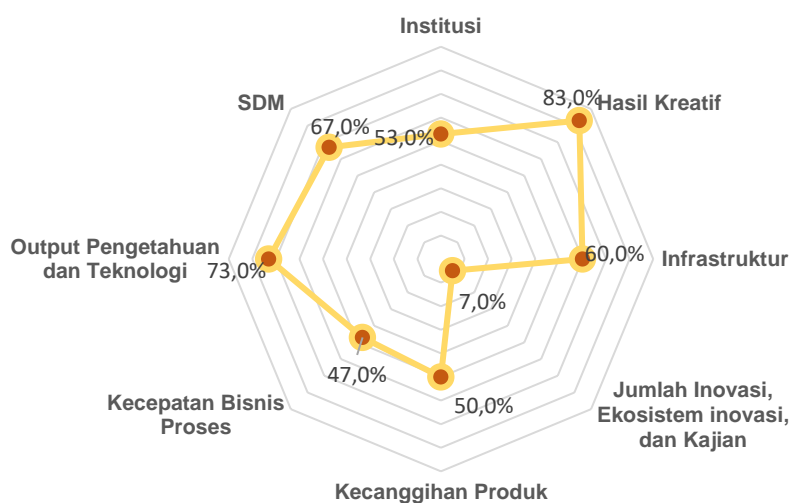
Aspek	Variabel	Indikator
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah



BAB II

**INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN
DAN KLASTER KOTA**

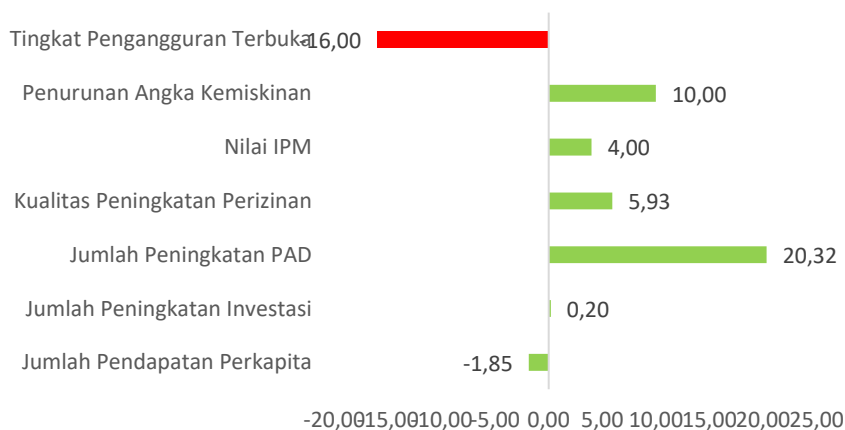
A. KABUPATEN BURU



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Buru

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Buru memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 7.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Buru

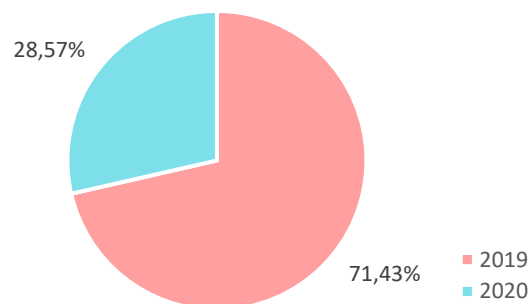
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Buru sudah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 16%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah

pengangguran terbuka naik 16%, hal ini belum sesuai dengan standart parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selain itu, indokator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami penurunan yaitu sebesar 1.85%, nilai tersebut memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 10%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 4% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami kenaikan sebesar 5,93% dimana nilai tersebut juga telah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan PAD yang meningkat sebesar 20,32% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Terakhir, Indikator Jumlah Peningkatan Investasi sebesar 0,20% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

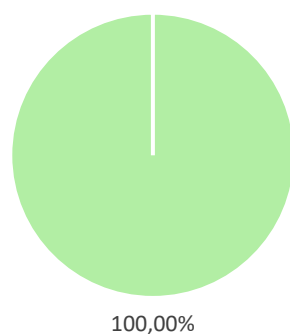
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Buru

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Buru telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 5 (71,43%) inovasi dari 7 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 2 (28,57%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

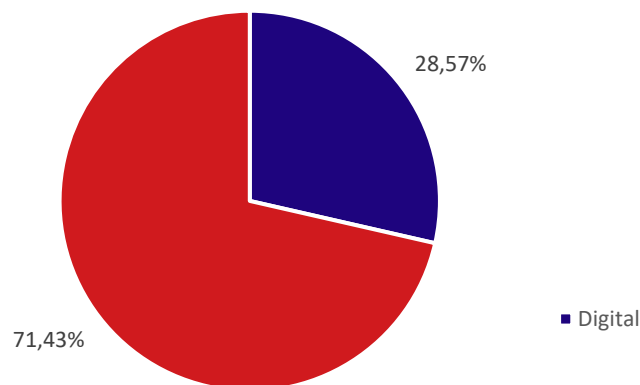
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Buru

Berdasarkan bentuk inovasi, semua inovasi yang ada di Kabupaten Buru berupa inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

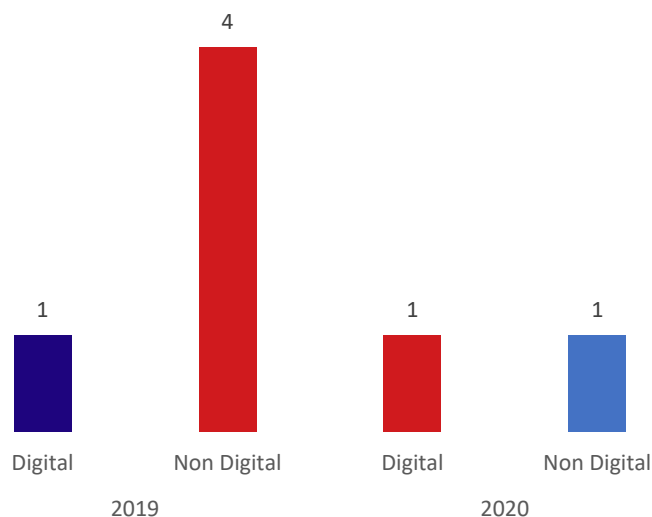
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Buru

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (28,57%) dari 7 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Buru merupakan inovasi digital, kemudian 5 (71,43%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

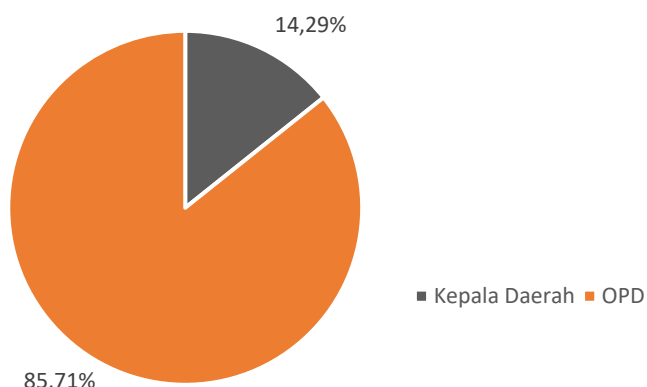
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Buru

Secara umum jumlah inovasi digital Kabupaten Buru tetap dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebanyak 1 inovasi, sedangkan inovasi non digital mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi.

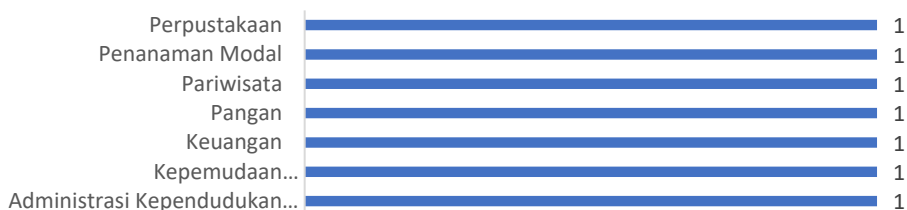
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Buru

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Buru pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD), yaitu sejumlah 6 (85,71%) inovasi, sementara sejumlah 1 (14,29%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah.

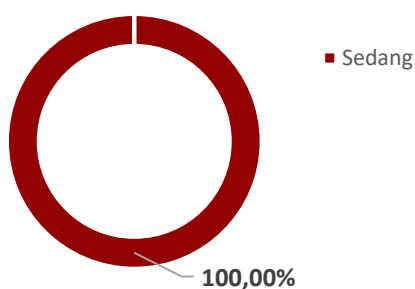
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Buru

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Buru berdasarkan urusan pemerintahan terlihat *flat*. Di mana terdapat urusan Perpustakaan, Penanaman Modal, Pariwisata, Pangan, Keuangan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing dengan 1 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat urusan wajib pelayanan dasar.

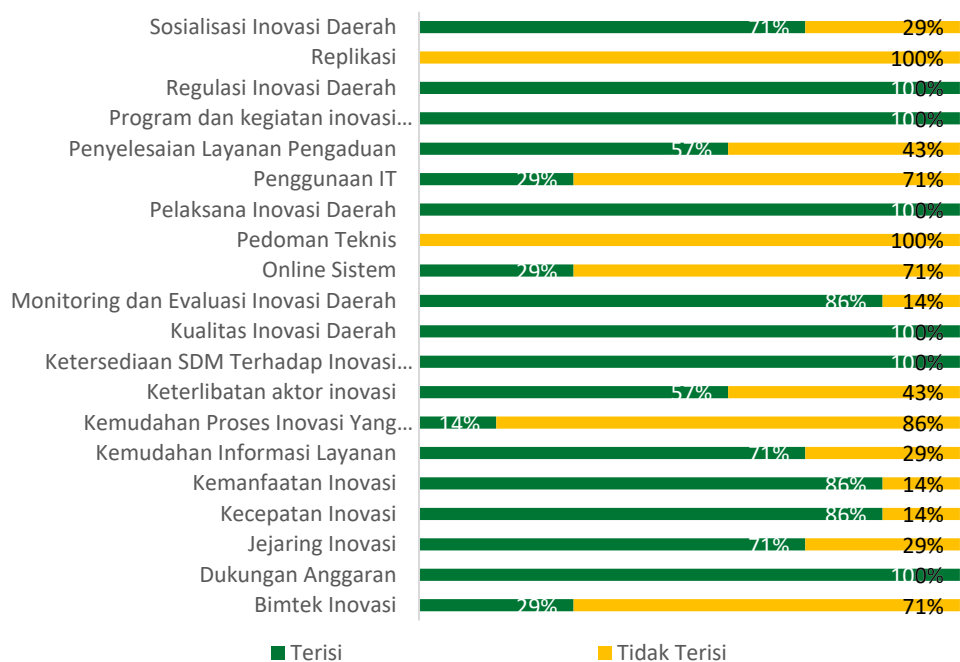
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Buru

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, semua inovasi di Kabupaten Buru mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

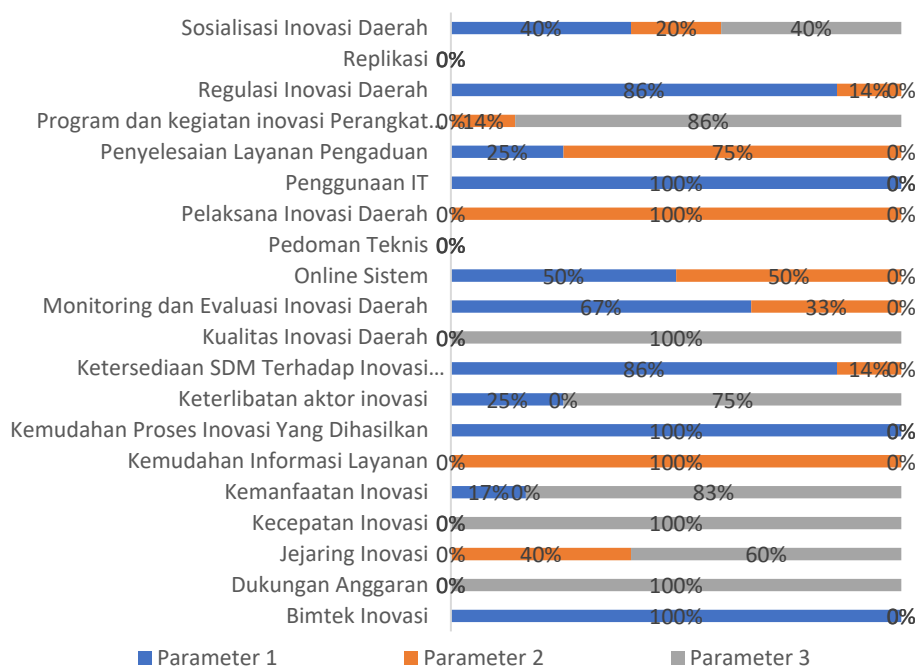
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buru

Dari 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Buru, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 35,71% sedangkan 64,29% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM serta Dukungan Anggaran merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung 100%, artinya semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Buru telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung sebesar 0% adalah indikator Replikasi dan Pedoman Teknis, artinya tidak terdapat inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

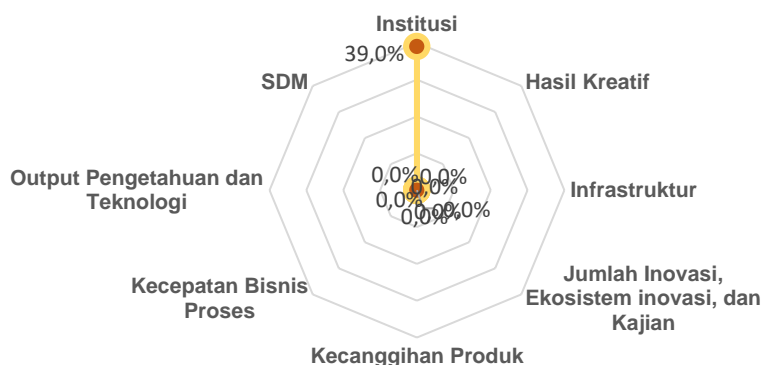
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, Kecepatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah dan Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah dan Kemudahan Informasi Layanan sebesar 100% artinya semua inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah dan Kemudahan Informasi Layanan termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT, Ketersediaan SDM, dan Bimtek Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk Penggunaan IT, Ketersediaan SDM, dan Bimtek Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Buru beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Buru

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Sistem Kerjasama Kejaksaan (SIJAKA)	82
Gerakan Bupolo Sehat (GERBUS)	77
Bulan Bakti Bersih Destinasi (BUDESI)	82
Bajalang Menjemput Izin (BAMETI)	92
Melayani Masyarakat Melalui Whatsapp (MAYAMEWA)	68
Sistem Informasi Geografis Distribusi dan Monitoring Ketersediaan Stok Pangan (SIGADIS MAPAN)	54
Gerakan Bupolo Membaca (GENCAR)	96

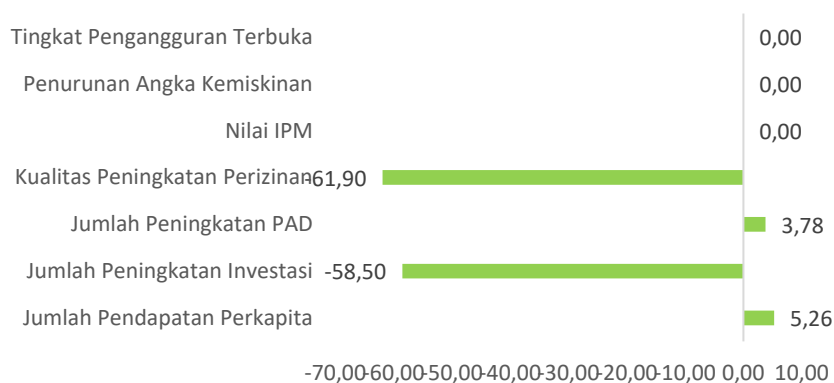
B. KABUPATEN BURU SELATAN



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Buru Selatan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 39.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun variabel lainnya yaitu variabel Hasil Kreatif, Infrastruktur, Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, serta SDM memiliki skor yang sangat rendah, yaitu 0,0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Buru Selatan

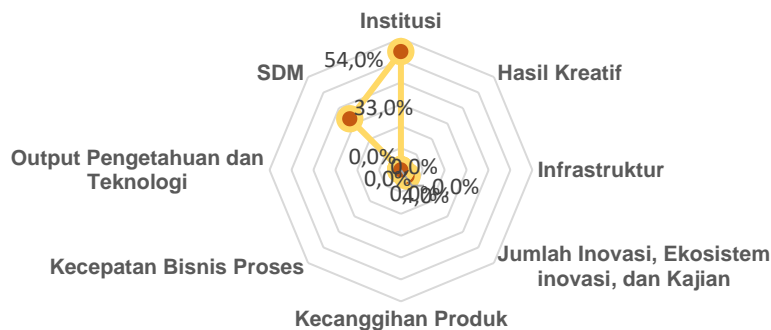
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Buru Selatan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan tidak ada peningkatan maupun penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang di mana nilai tersebut belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%, Penurunan Angka Kemiskinan di mana angka tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 0.02% dan nilai Indeks Pembangunan Manusia di mana

nilai tersebut telah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 61,90%, nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan juga mengalami penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi sebesar 58,50% di mana nilai tersebut belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Indikator Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 3,78%, nilai tersebut sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 8.00%. Terakhir, Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami peningkatan sebesar 5,26% sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 1.85%.

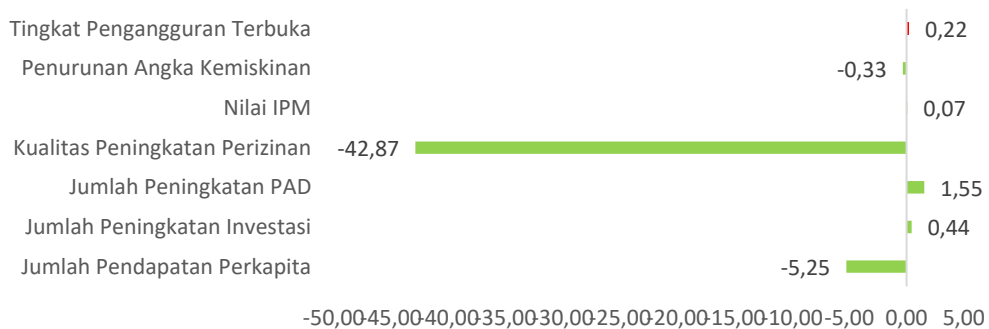
C. KABUPATEN KEPULAUAN ARU



Gambar 14. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kepulauan Aru memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 54.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Variabel dengan skor terendah antara lain variabel Hasil Kreatif, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, dan Output Pengetahuan dan Teknologi memiliki skor yang sangat rendah, yaitu 0.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



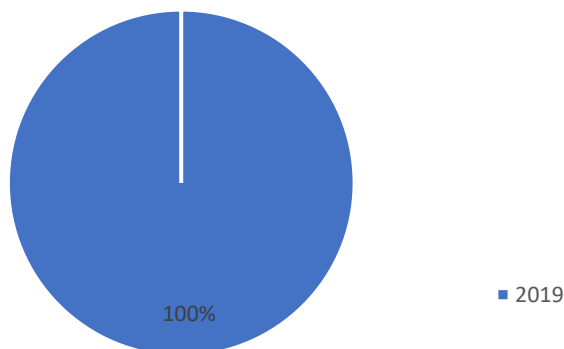
Gambar 15. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 0,33% yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 42,87%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Serta indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami penurunan sebesar 5,25% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan sebesar 1,85%.

Indikator lain seperti Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,22%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka turun 0,22%, hal ini telah sesuai dengan standart parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0,07% dimana nilai memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru juga mengalami peningkatan pada Indikator Peningkatan PAD sebesar 1,55%, namun nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%. Terakhir, Jumlah Peningkatan Investasi yang mengalami kenaikan sebesar 0,44% dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

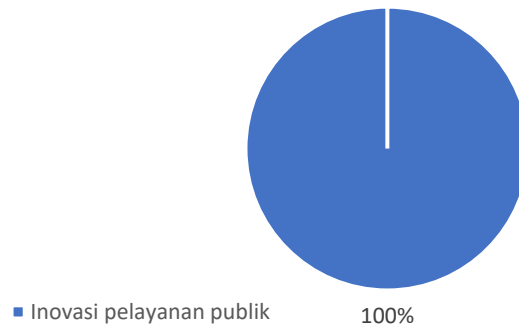
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Aru

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Aru telah diterapkan sejak tahun 2019.

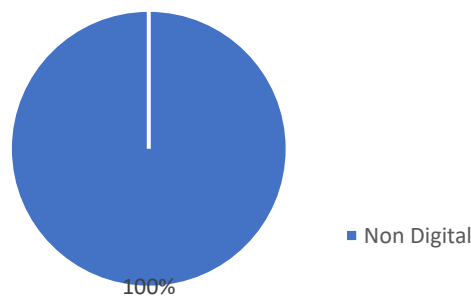
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 17. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Aru

Berdasarkan bentuk inovasi, semua inovasi yang di Kabupaten Kepulauan Aru berupa inovasi pelayanan publik.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Buru Selatan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, semua inovasi yang yang dilaporkan Kabupaten Kepulauan Aru merupakan inovasi non digital.

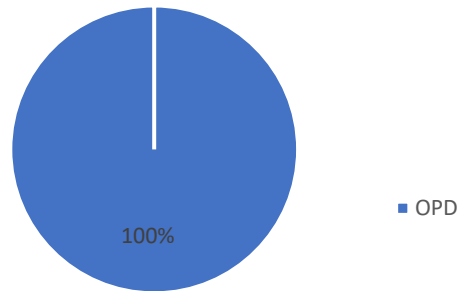
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 19. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kepulauan Aru

Jumlah inovasi di Kabupaten Kepulauan Aru tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 1 inovasi kemudian pada tahun 2020 tidak terdapat inovasi yang diterapkan.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Aru

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD), yaitu sejumlah 1 (100%) inovasi. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh kepala daerah, perangkat daerah, ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

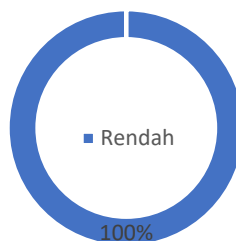
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 21. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kepulauan Aru

Kabupaten Kepulauan Aru hanya melaporkan sebanyak 1 inovasi untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. sementara untuk urusan lainnya belum dilaporkan.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 22. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kepulauan Aru

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi di Kepulauan Aru masih mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

TIDAK MUNCUL GAMBAR.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

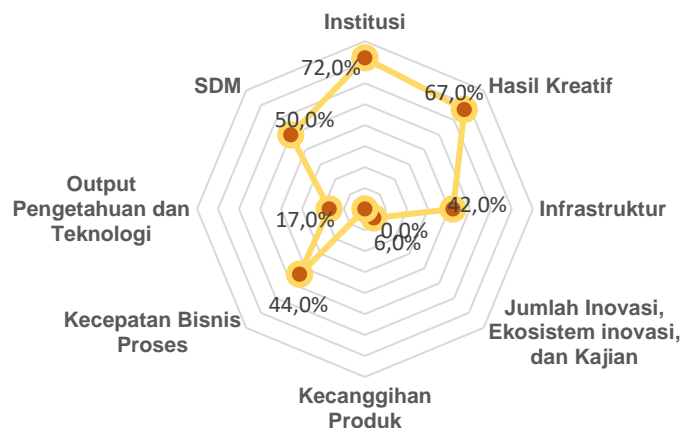
TIDAK MUNCUL GAMBAR.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Aru beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Aru

Nama Inovasi	Skor Kematangan
KTP-IUMK	0

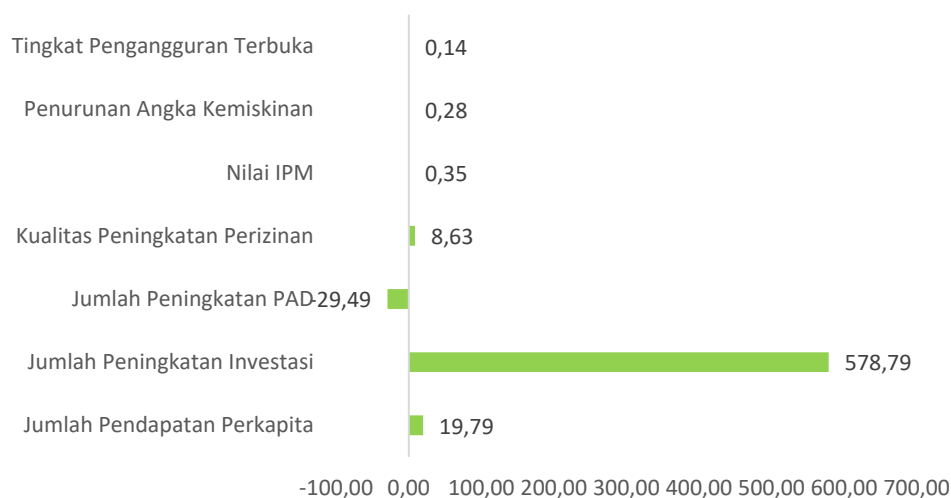
D. KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 72.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 0.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



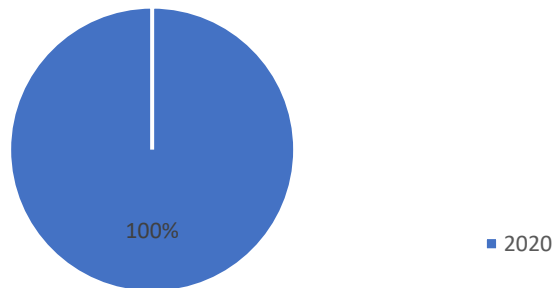
Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Barat Daya belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 29,49% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%.

Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,14%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka turun 0,14%, hal ini sudah sesuai dengan standart parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,28%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.35%, dimana nilai tersebut memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 8,63%, nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. . Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Jumlah Investasi sebesar 578,79% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%. Terakhir Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 19,79%, dimana nilai tersebut lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

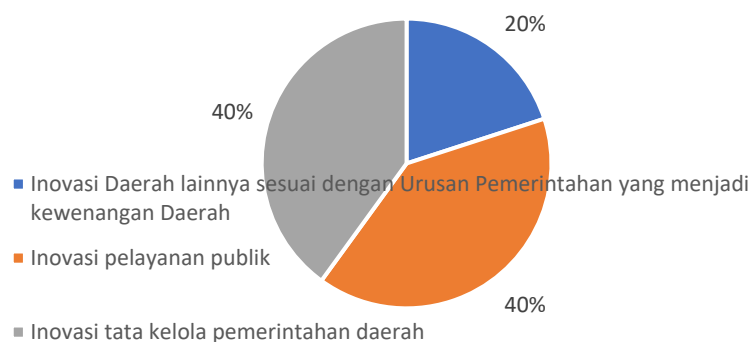
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Barat Daya telah diterapkan sejak tahun 2020.

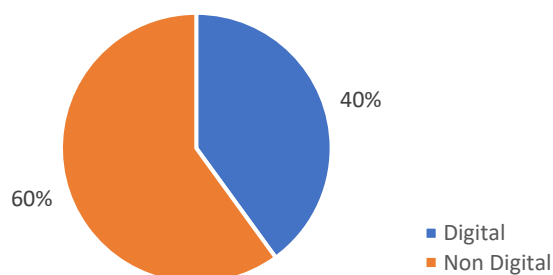
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi di Kabupaten Maluku Barat Daya berupa inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintah daerah yang masing-masing sebanyak 2 (40%) dan sisanya sebanyak 1 (20%) berupa inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

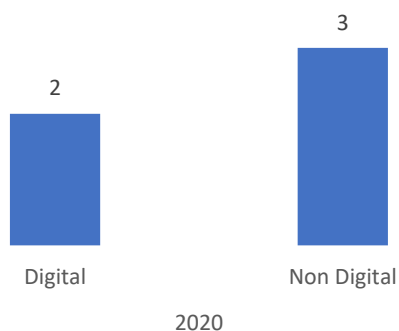
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, terdapat 2 jenis inovasi yaitu inovasi digital dan non digital. Sebanyak 2 (40%) dari 5 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan inovasi digital, dan 3 (60%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

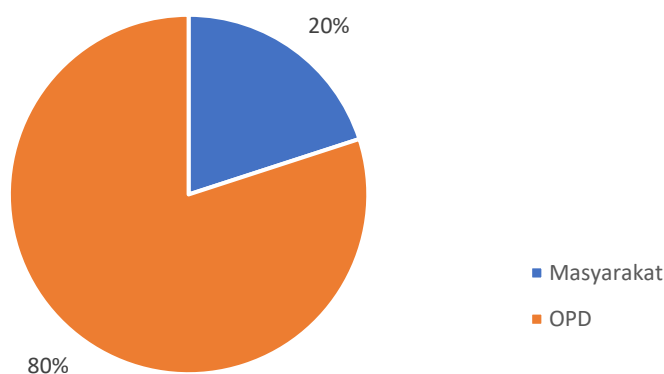
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Maluku Barat Daya

Secara umum jumlah inovasi di Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat pada tahun 2019 banyaknya inovasi digital yang diterapkan sejumlah 0 inovasi namun pada tahun 2020 naik menjadi 2 inovasi. Begitu pula untuk inovasi non digital di mana pada tahun 2019 tidak ada inovasi yang diterapkan lalu pada tahun 2020 naik menjadi 3 inovasi.

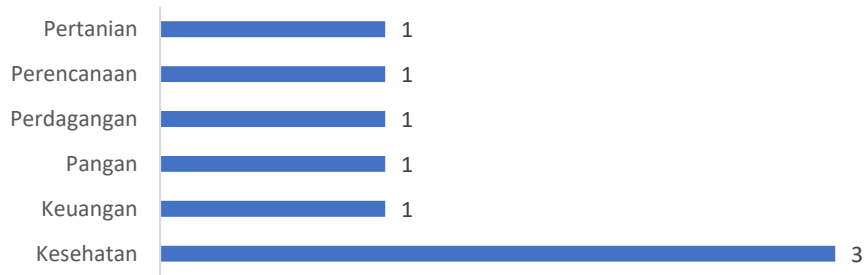
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD) yaitu sejumlah 4 (80%), dan sejumlah 1 (20%) lainnya diinisiasi oleh Masyarakat.

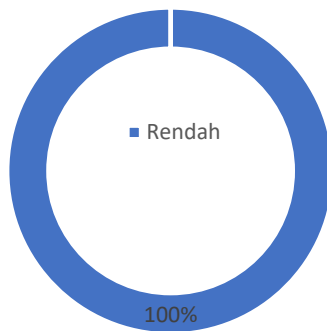
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan urusan pemerintahan rata-rata terlihat stabil. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 3 inovasi dari 5 inovasi yang dilaporkan sekaligus menjadi satu-satunya inovasi daerah termasuk urusan wajib pelayanan dasar.

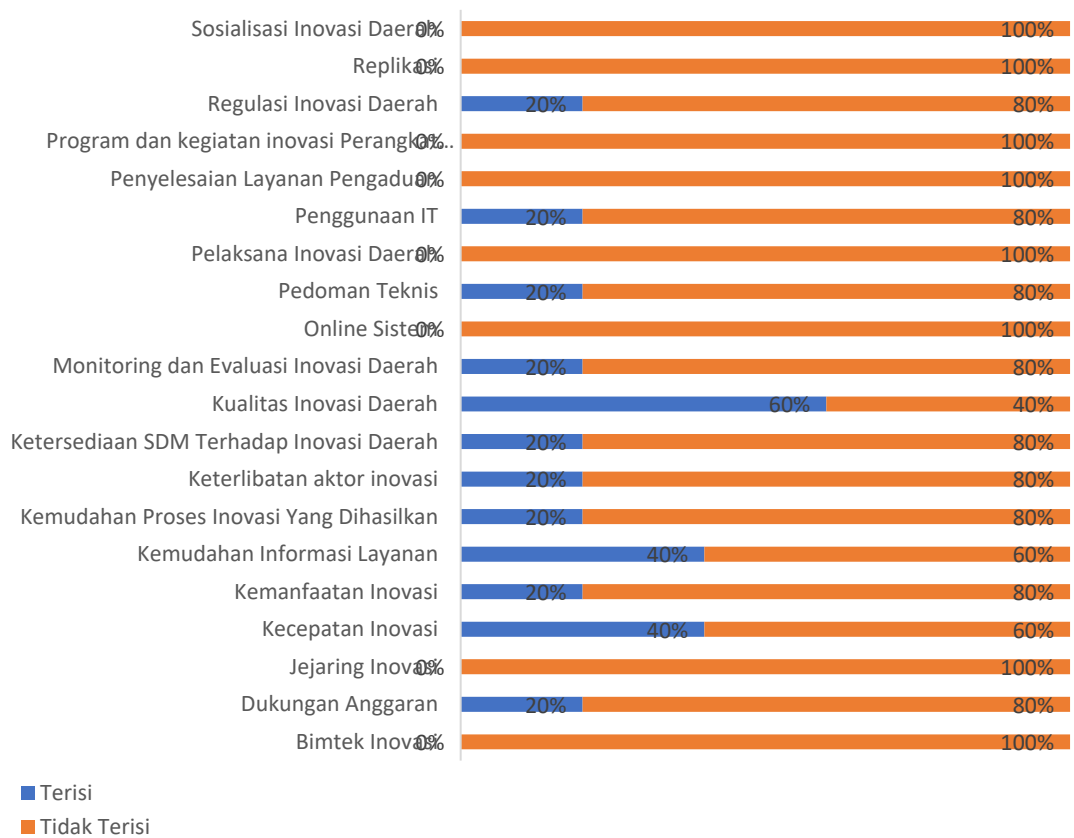
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Maluku Barat Daya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi di Kabupaten Maluku Barat Daya masih mencapai skor kematangan rendah yaitu sejumlah 5 (100%) inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

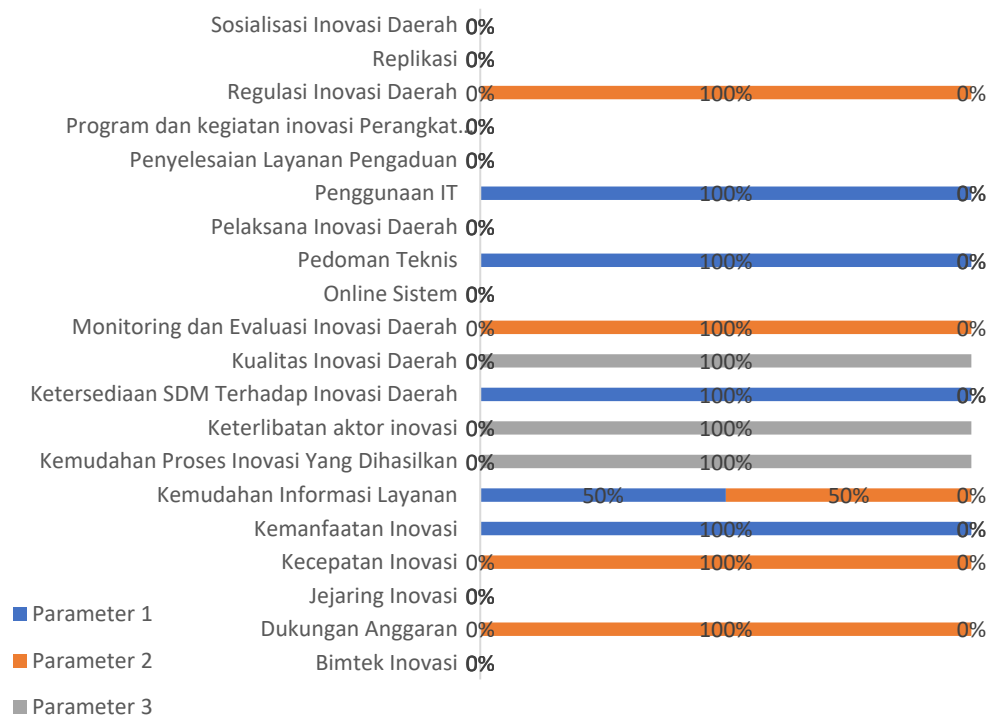
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Barat Daya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 84% sedangkan 16% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator inovasi daerah yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi yaitu indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 60%, artinya 60% dari inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Barat Daya telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Sosialisasi, Replikasi, Program dan Kegiatan Inovasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Pelaksana Inovasi, Online Sistem, Jejaring Inovasi, dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi, Monitoring dan Evaluasi, Kecepatan Inovasi dan Dukungan Anggaran sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi, Monitoring dan Evaluasi, Kecepatan Inovasi dan Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Kemudahan Proses sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Kemudahan Proses.

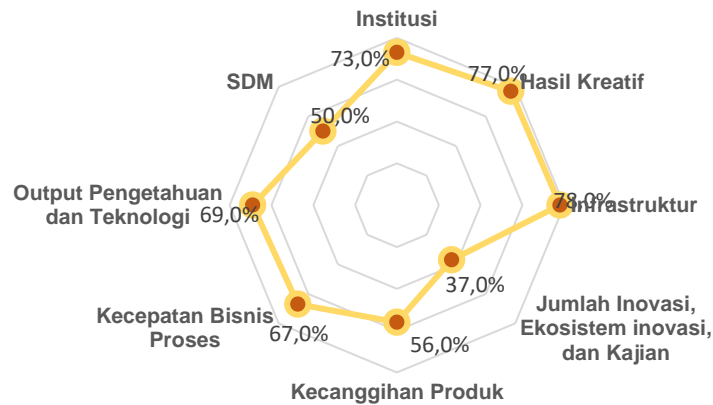
j. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Barat Daya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	15
Mini Market C-19	15
Inovasi Wide Area Network	15

Wide Area Network pada SIMDA untuk mecsncapai opini WTP	0
Penerapan Inovasi Teknologi Pengembangan Bawang Merah Lakor di luar Musim (off season)	0

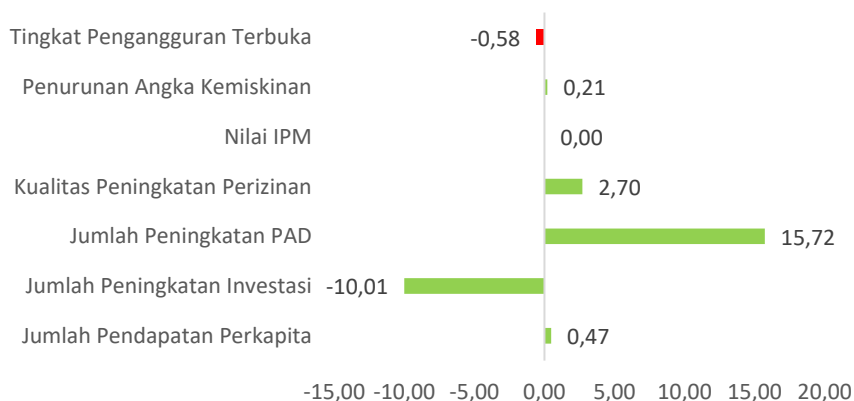
E. KABUPATEN MALUKU TENGAH



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Maluku Tengah

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Maluku Tengah memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 77.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 37.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tengah

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tengah belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan

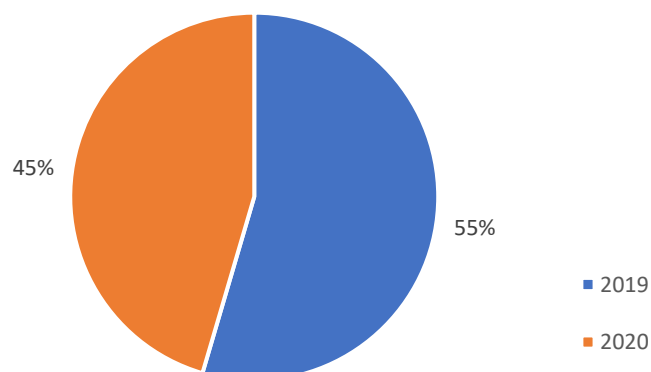
pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,58%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik 0,58%, hal ini sesuai dengan standart parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami penurunan sebesar 10,01% dimana nilai tersebut tidak memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%

Indikator penurunan Angka Kemiskinan pada Kabupaten Maluku Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,21%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,21.% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami kenaikan sebesar 2,70% dimana nilai tersebut belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. indikator Jumlah Peningkatan PAD yang meningkat sebesar 15,72% dimana nilai tersebut telah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%. Begitu pula indikator Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Maluku Tengah yang juga mengalami kenaikan sebesar 0,47%, nilai tersebut lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya menurun sebesar 1.85%

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, dimana nilai tersebut sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Terakhir,

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

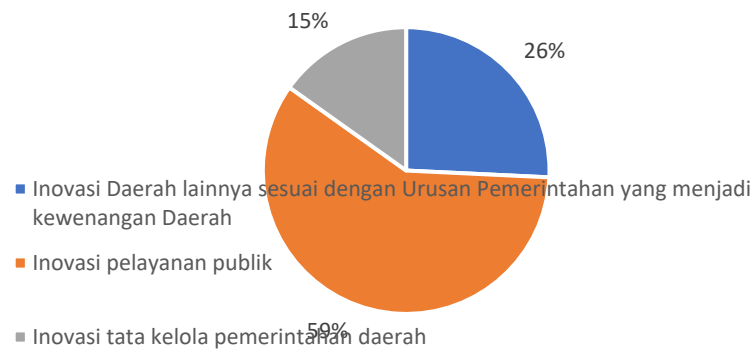
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Maluku Tengah

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Buru telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 36 (54,55%) inovasi dari 66 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 30 (45,45%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

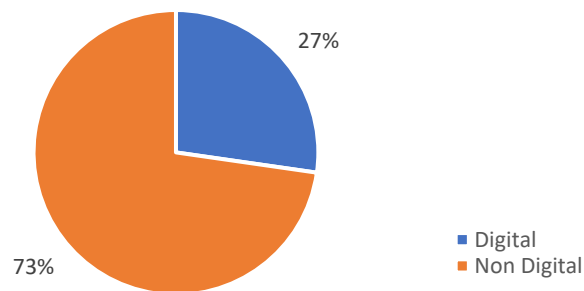
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Maluku Tengah

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi di Kabupaten Maluku Tengah berupa pelayanan publik yaitu sebanyak 39 (59,09%), sebanyak 17 (25,76%) berupa inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, dan sisanya sebanyak 10 (15,15%) berupa inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

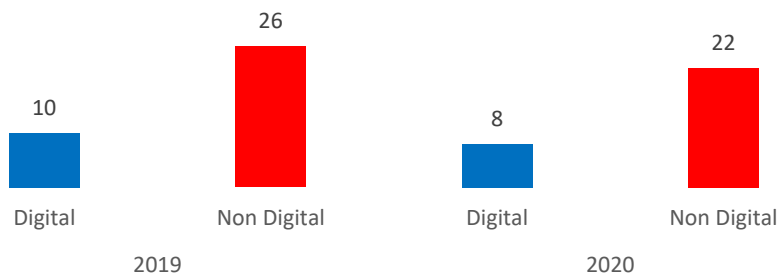
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Maluku Tengah

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebanyak 48 (72,73%) dari 66 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Maluku Tengah merupakan inovasi non digital. Sedangkan 18 (27,27%) lainnya berupa inovasi digital.

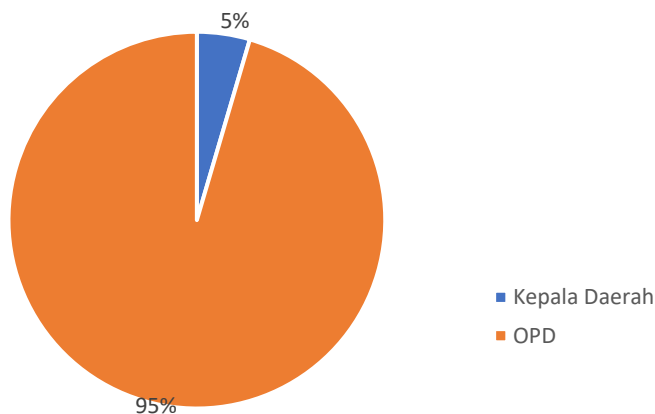
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Maluku Tengah

Secara umum jumlah inovasi digital mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 di Kabupaten Maluku Tengah. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 inovasi digital yang diterapkan sejumlah 10 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 8 inovasi. Begitu pula untuk inovasi non digital di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 26 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 22 inovasi.

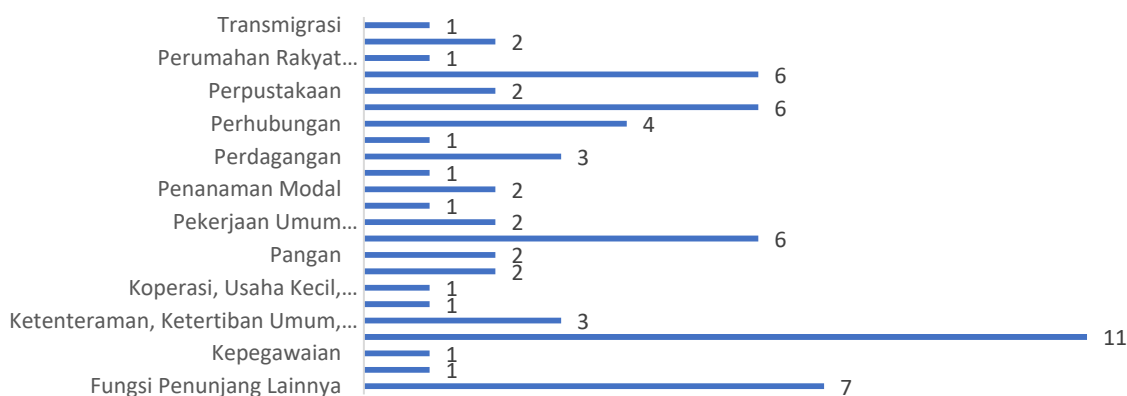
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Maluku Tengah

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD), yaitu sejumlah 63 (95,45%), sisanya sebesar 3 (4,55%) inovasi dilaporkan oleh kepala daerah.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

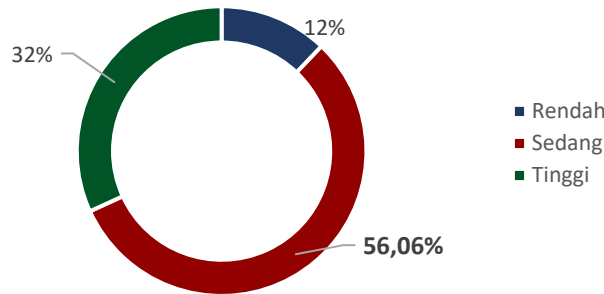


Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Maluku Tengah

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan urusan pemerintahan terlihat fluktuatif. Urusan inovasi yang paling banyak dilaporkan berupa kesehatan dengan 11 inovasi. Urusan Transmigrasi, Perumahan Rakyat, Perencanaan, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koperasi Usaha Kecil, Keuangan, Kepegawaian, dan Kelautan merupakan urusan inovasi yang paling sedikit dilaporkan dengan masing-masing banyaknya inovasi sebanyak 1 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan sebanyak 11 inovasi, Pekerjaan Umum sebanyak 2 inovasi, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman sebanyak 1 inovasi, serta ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 3 inovasi.

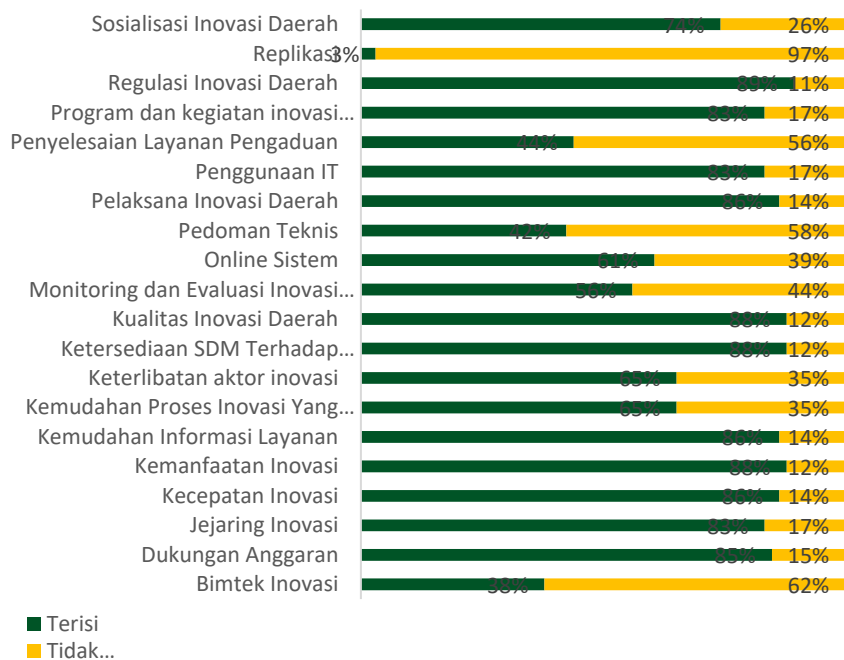
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Maluku Tengah

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi di Kabupaten Maluku Tengah sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sejumlah 37 (56,06%) inovasi. Selain itu, terdapat 21 (31,82%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi dan 8 (12,12%) inovasi yang memiliki skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

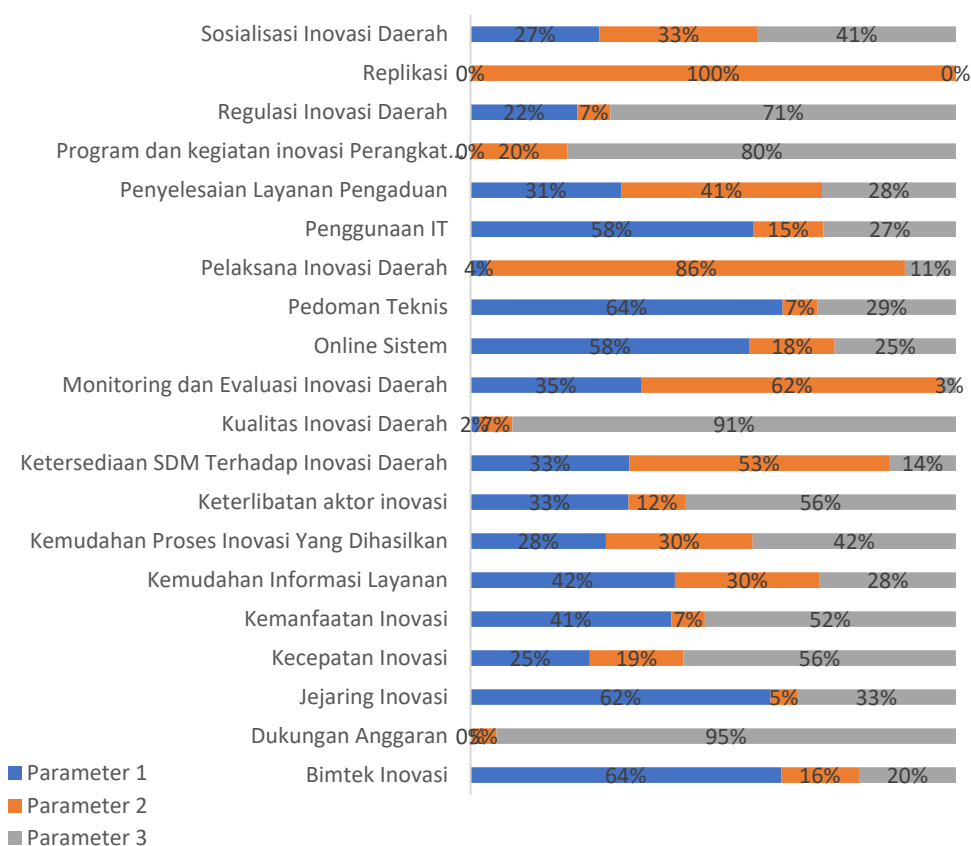
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tengah, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 30,23% sedangkan 69,77% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 89% artinya 89% dari inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tengah telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu sebesar 3% artinya hanya 2 dari 66 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 95%, artinya 95% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya semua inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Replikasi termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis dan Bimtek Inovasi sebesar 64% artinya 64% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Pedoman Teknis dan Bimtek Inovasi.

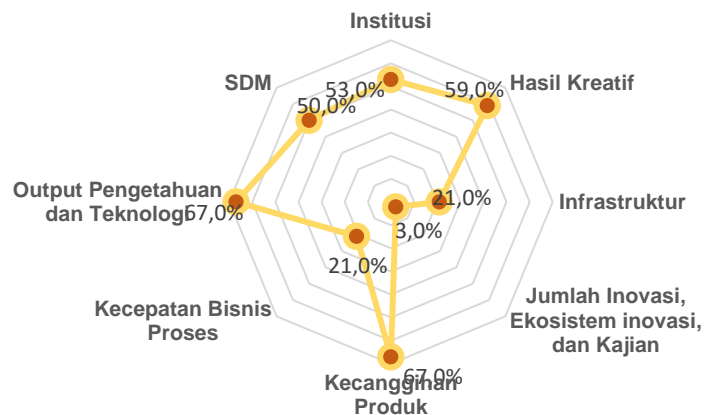
j. **Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tengah beserta Skor Kematangannya**

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tengah

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pasar Tradisional C-19	0
Pasar Modern C-19	0
PTSP C-19	0
Tempat Wisata C-19	0
TRANSPORTASI UMUM C-19	0
Hotel C-19	0
Restoran C-19	0
SIMRUSWA (Sistem Informasi Rumah Swadaya)	109
TABAOS-2 (PSPA - 2/Sistem Komunikasi Pelayanan Kesehatan Terintegrasi di RSUD Masohi dalam 2 Bahasa ; Indonesia dan Ambon)	113
Wajib Tertib Dalam Menimbang (Wate Dani)	110
E-PUSTAKA - Elektronik Perpustakaan Berbasis Online	116
PELITA - Perpustakaan Keliling Tanpa Batas	113
KARTU RASA SAYANG (Kartu prioritas yang dirancang secara elektronik bagi orang disabilitas, orang lanjut usia, pasien resiko tinggi, ibu hamil)	112
Rumah Pangan Mandiri	90
Kampung Orang Basudara	71
IBU SATU SALAH (Inseminasi Buatan Satu Tahun Sapi Lahir)	116
HASRAT (Hathcery Skala Rumah Tangga)	81
ELEKTRONIK KINERJA	57
Pembibitan Ternak Sapi Bali	68
IKAN GABUNG SAGU (Inovasi Pakan Tiga Bulan Sapi Gemuk)	74
MOTOR KASIH	70
CPPA (Cerdas Profesional Pemberi Asuhan)	115
PELAYANAN ICU TANPA TEMBOK (Pelayanan ICU tanpa batas di Masa Pandemi Covid-19 Pada RSUD Masohi)	115
PETERNAKAN TANPA LIMBAH (Teknologi Sistim Integrasi Ternak - Tanaman dalam Penerapan Bioindustri)	63
GEMAR (Gerakan Mandiri Telur)	63
Satu Dara (Selamat Adalah Tujuan Utama Dalam Berkendaraan)	70
Tapal Siwa (Terminal, Pelabuhan Bersih Berwibawa)	75
Kalesang Penumpang (Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Penumpang)	81

Gerakan Sedekah Sampah Kalesang Negeri	94
DOPARAJA (Daftar Online Pasien Rawat Jalan)	117
KARTU PASIEN RAMAH	107
Kaliber	91
REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	84
Gojek (Gerakan Organisasi Jenguk Kantor)	93
LapakLing (Pelayanan Pajak Daerah Keliling)	89
Walang Inovasi	116
FORSANDES	81
Kaperkesga	83
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KEPADA OPD MELALUI WHATSAPP (PAPEDA)	54
KAPURSIRI / Kampung Pupuk Organik	59
Bang Calo (Pengembangan Cabe Holo)	72
Pelayanan Dukcapil Mobile	12
Pinjaman Tanpa Bunga	91
KLIK OPEN PBJ (KLINIK KONSULTASI DAN PENDAMPINAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)	114
Taman Nunusaku (Kota Nyaman, Penduduk Suka, Pengunjung Senang)	80
JDIH Online	92
Kampus Negeri	99
Pengembangan Kawasan Industri (PASASI)	83
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BISNIS	114
TAMPAYANG (Tempat Penyimpanan Air di Lingkungan)	77
TABEA (Tabaos Bupati Maluku Tengah)	99
Soldadu Siaga Bencana	87
Pengembangan Produk Unggulan Kelapa dan Turunannya	85
PERAS NATA	84
JEMPOL INVESTASI (Jemput Bola dan Pendampingan dalam Penyampaian LKPM)	92
TempAt pengGALangan kreAtifitas dan upaYA promoSI ProdUk indusTRI (TAGALAYA SIPUTRI)	108
Pengembangan Batik Ciri Khas Daerah	88
Pengembangan Bordiran Ciri Khas Daerah	88
POLIKLINIK INA AMA	121
PAPARISA (PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA SOSIAL)	92
BALIDAPAT-3 PLUS	107
KALESANG PELAYANAN	125
Subsidi Pangan	109
Inovasi KB Mobile Service (KB Bergerak)	91
PANGKAS MASALAH	104
SILAPA	102

F. KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi serta kecanggihan produk, yaitu 67%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi serta kecanggihan produk sudah memiliki skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih rendah, yaitu 3.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara

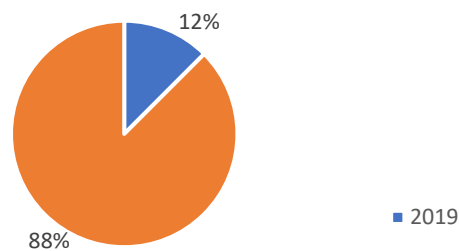
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2.49%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik 2,49%, hal ini belum sesuai dengan standart parameter indeks

inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami penurunan yaitu sebesar 45,20% dimana nilai tersebut jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Indikator lainnya yang mengalami penurunan yaitu indikator Jumlah Peningkatan PAD yang turun sebesar 39,28% dimana nilai tersebut masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8% dan terakhir indikator Jumlah Investasi yang mengalami penurunan sebesar 4,72% dimana nilai tersebut sudah tidak baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya mengalami peningkatan sebesar 0.45%.

Sedangkan indikator lainnya mengalami kenaikan di mana indikator Penurunan Angka Kemiskinan pada mengalami peningkatan sebesar 0,18%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 0,35% dimana nilai tersebut juga sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita naik sebesar 0,71%, nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

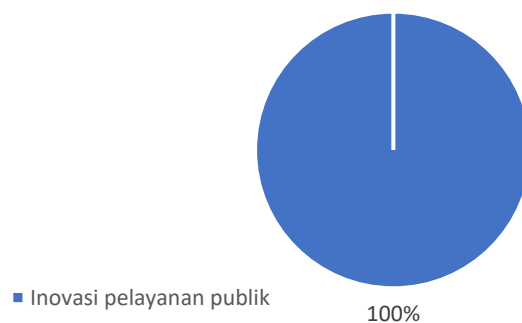
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 1 (12,5%) inovasi dari 8 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 7 (87,5%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

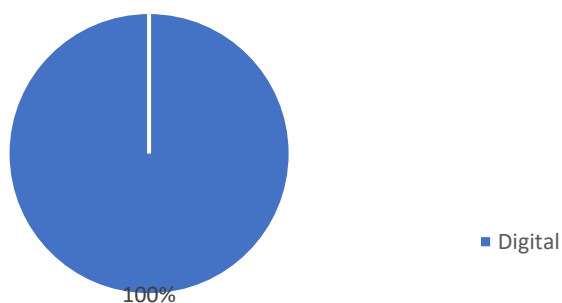
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan bentuk inovasi, pada Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 8 inovasi yang semuanya berupa inovasi dalam pelayanan publik.

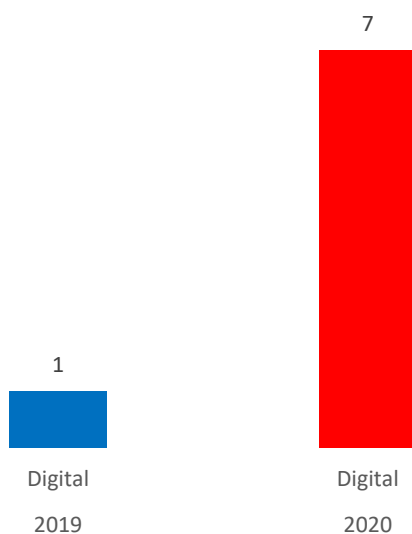
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebanyak 8 (100%) inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan inovasi digital.

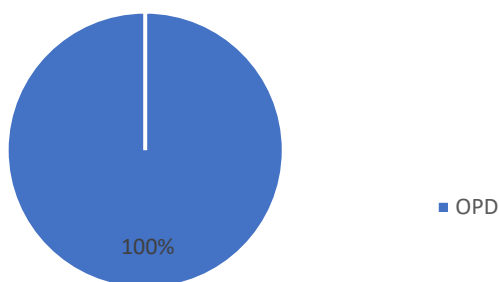
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara

Secara umum jumlah inovasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 untuk inovasi digital yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 1 inovasi, pada tahun 2020 menjadi 7 inovasi. Sedangkan untuk jenis inovasi non digital belum ada pelaporan dari Kabupaten Maluku Tenggara.

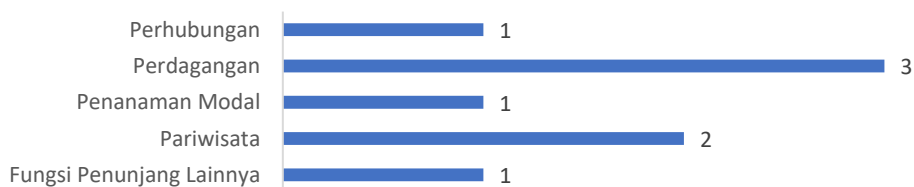
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara

Semua inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah (OPD), yaitu sejumlah 8 (100%) inovasi.

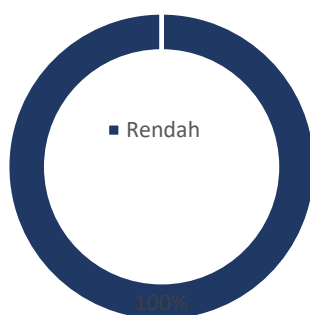
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Maluku Tenggara

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan urusan pemerintahan terlihat fluktuatif. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan Perdagangan, yaitu sebanyak 3 inovasi dari 8 inovasi yang dilaporkan. Sedangkan urusan yang paling sedikit dilaporkan yaitu inovasi pada urusan Perhubungan, Penanaman Modal, dan Fungsi Penunjang Lainnya, yaitu masing-masing sebanyak 1 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak ada urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara.

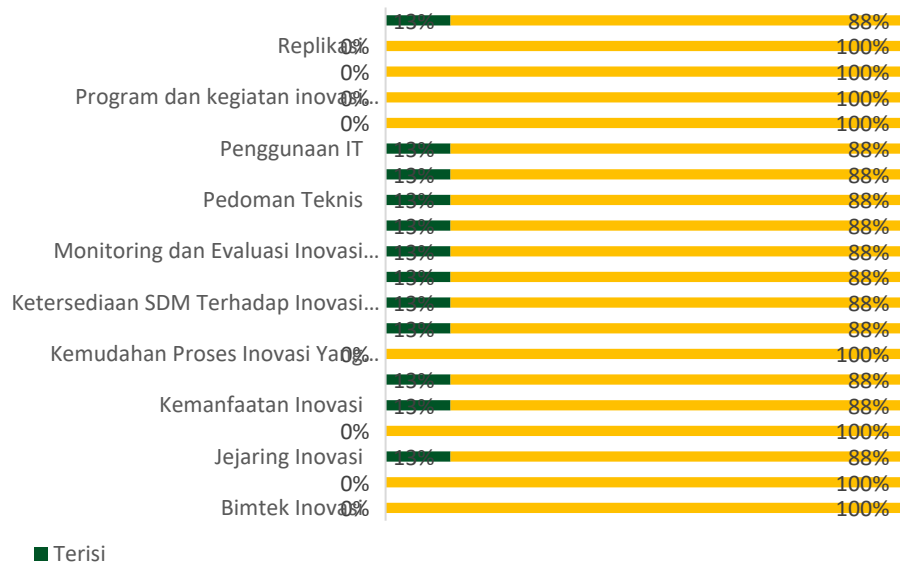
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Maluku Tenggara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, semua inovasi di Kabupaten Maluku Tenggara masih mencapai skor kematangan rendah, yaitu sejumlah 8 (100%) inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

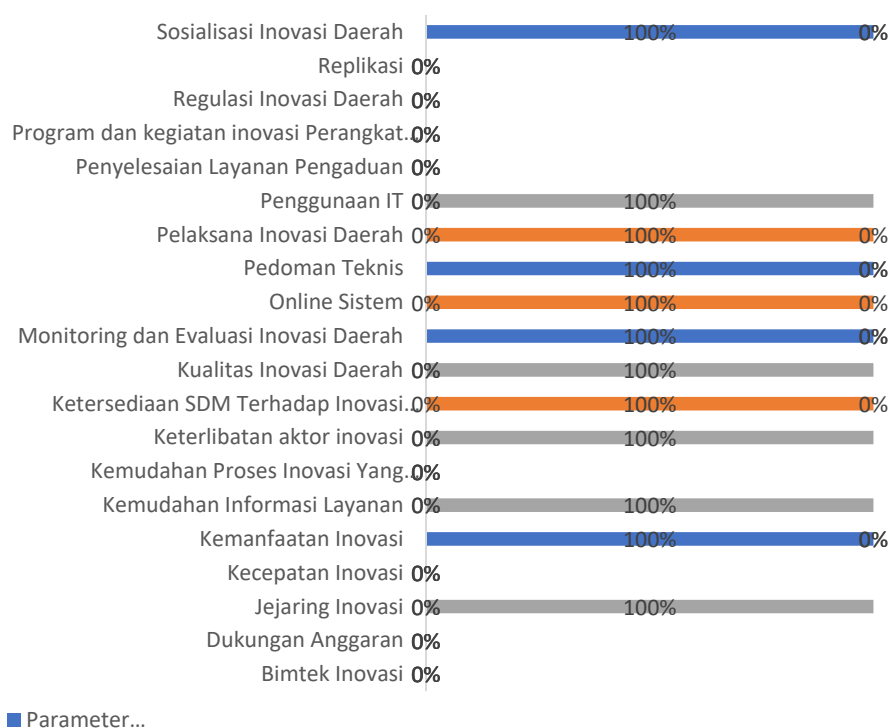
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 92,50% sedangkan 7,50% lainnya telah terisi data pendukung. Beberapa indikator memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung tertinggi, sebesar 13% yaitu indikator Sosialisasi, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi, Kualitas Inovasi, Ketersediaan SDM, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi dan Jejaring Inovasi. Artinya 1 dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Beberapa indikator memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung 0% diantaranya Replikasi, Regulasi, Program dan Kegiatan Inovasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Kemudahan Proses Inovasi, Bimtek Inovasi, dan Dukungan Anggaran, artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Ekonomi, Kemudahan Informasi Layanan, dan Jejaring Inovasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Ekonomi, Kemudahan Informasi Layanan, dan Jejaring Inovasi termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, dan Ketersediaan SDM sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, dan Ketersediaan SDM termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi, Pedoman Teknis, Monitoring dan Evaluasi serta Kemanfaatan sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Sosialisasi, Pedoman Teknis, Monitoring dan Evaluasi serta Kemanfaatan.

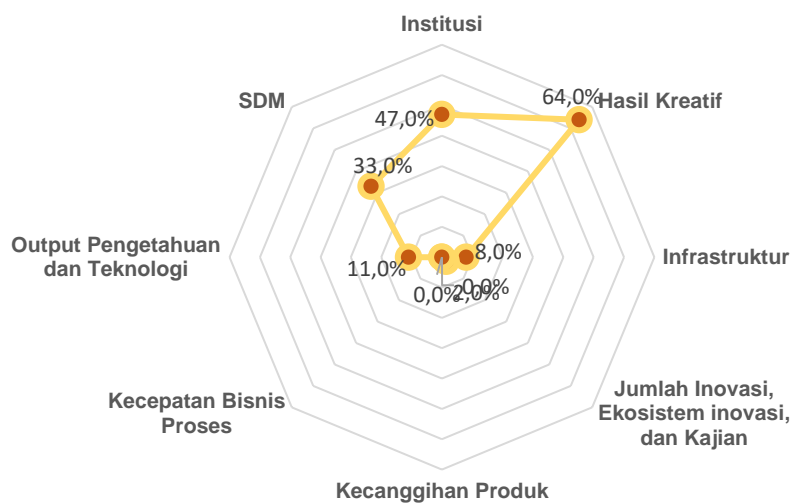
j. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 pada Sektor Transportasi Umum C-19	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata C-19	0

Inovasi daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP C-19.	0
Inovasi daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar ModernMal C-19	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel C-19	0
Penerapan New Normal Pada Pasar Tradisional C-19 Kabupaten Maluku Tenggara	0
Penerapan New Normal Pada Restaurant C-19 di Kabupaten Maluku Tenggara	0
Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SI-PARADE)	45

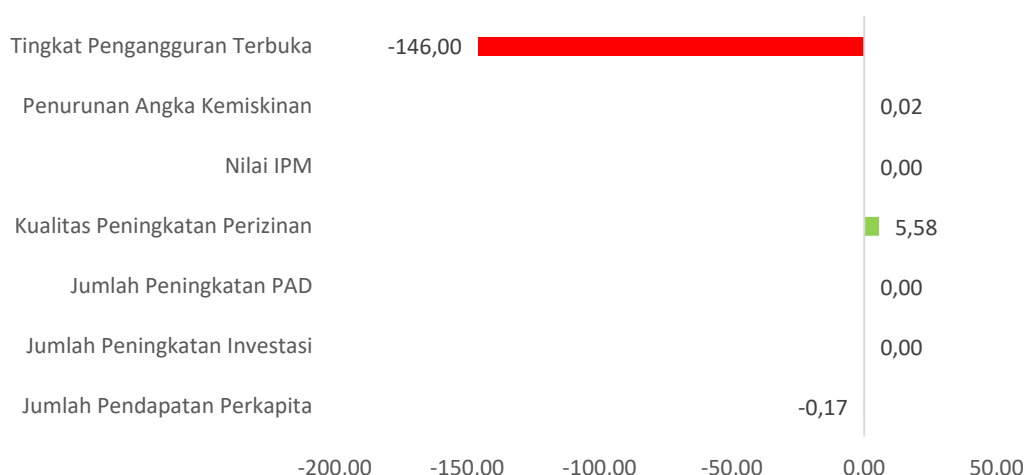
G. KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Output Hasil Kreatif, yaitu 64.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Kecepatan Bisnis dan Kecanggihan Produk masih cukup rendah, yaitu 0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

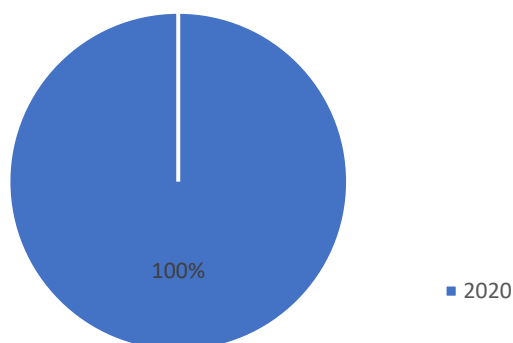
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu sebesar 146%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik 146%, hal ini belum sesuai dengan standart parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator lain yang juga mengalami penurunan yaitu indikator Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 0,17% yang dimana nilai tersebut memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami peningkatan sebesar 0,02% yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami kenaikan sebesar 5,58% dimana nilai tersebut juga tidak lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%.

Indikator yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana nilai tersebut juga sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap, indikator Jumlah Peningkatan PAD dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%, dan indikator Jumlah Investasi dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

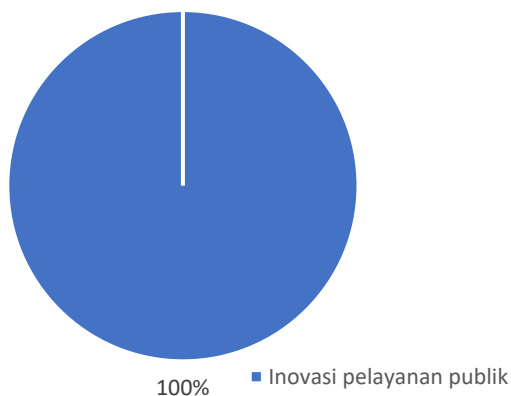
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat diterapkan sejak tahun 2020.

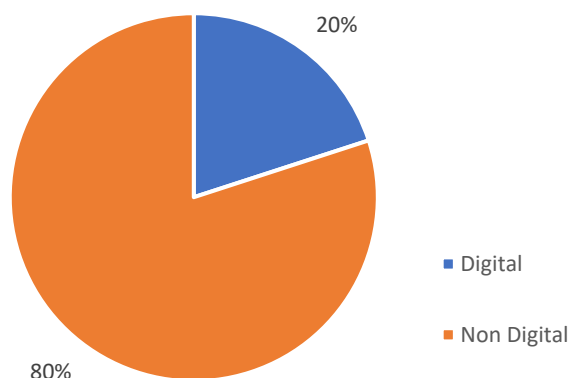
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat berupa inovasi daerah sesuai dengan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

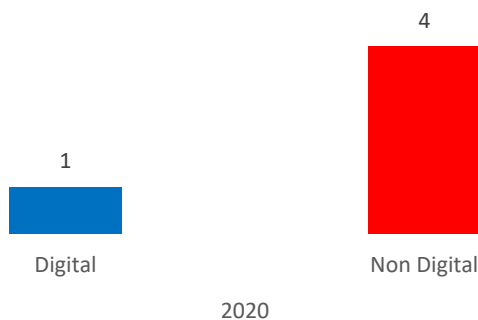
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 1 (20%) dari 5 inovasi daerah yang dilaporkan Kabuapten Maluku Tenggara Barat merupakan inovasi digital, dan kemudian 4 (80%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

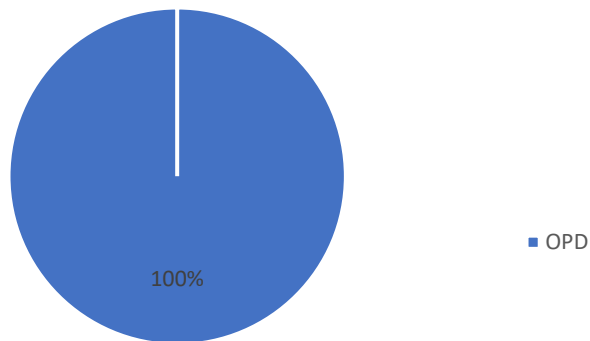
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Secara umum jumlah inovasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 tidak ada inovasi yang diterapkan namun pada tahun 2020 naik menjadi 1 inovasi. Begitu pula dengan Inovasi non digital mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 tidak ada inovasi yang diterapkan lalu pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi.

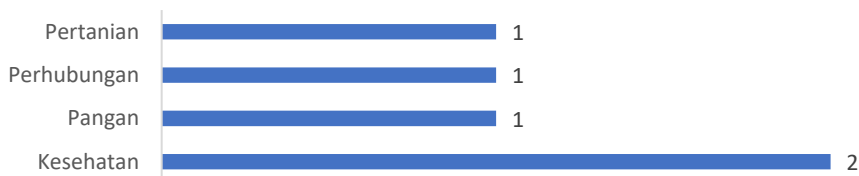
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Semua inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Bagian Barat pada tahun 2020 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD).

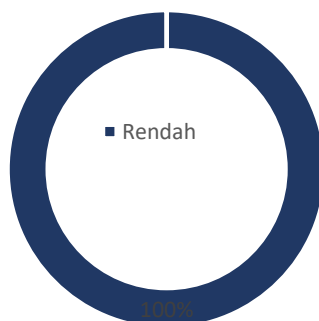
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan urusan pemerintahan terlihat konstan. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada kesehatan dengan 2 inovasi dari 5 inovasi yang juga merupakan satu-satunya urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan.

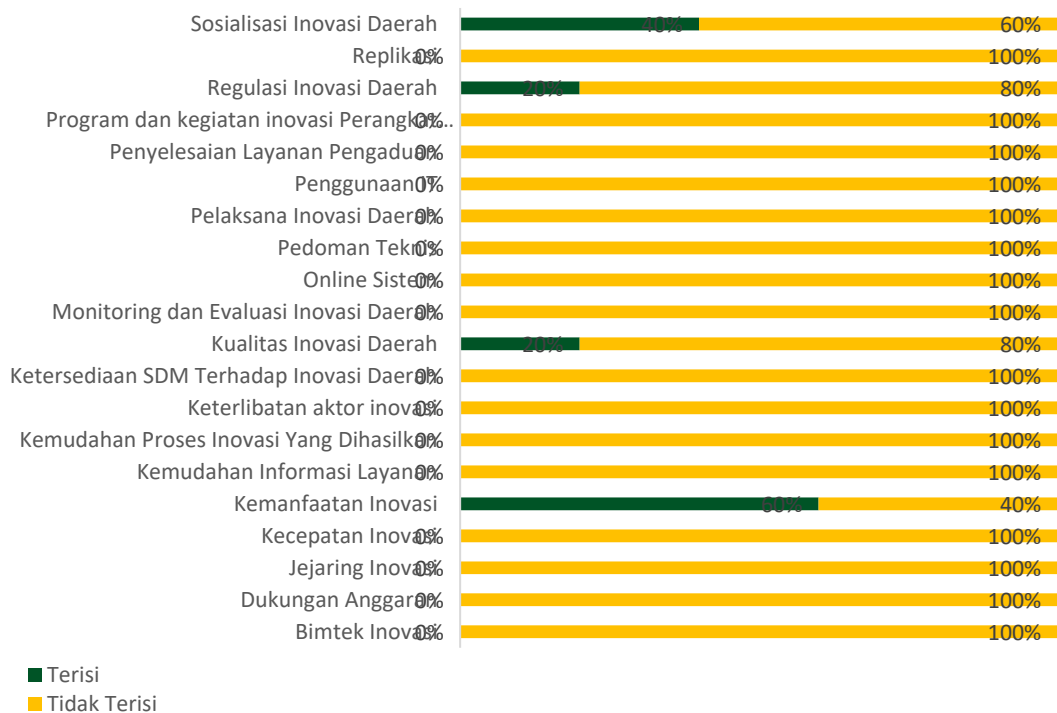
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih mencapai skor kematangan rendah, yaitu sejumlah 5 (100%) inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

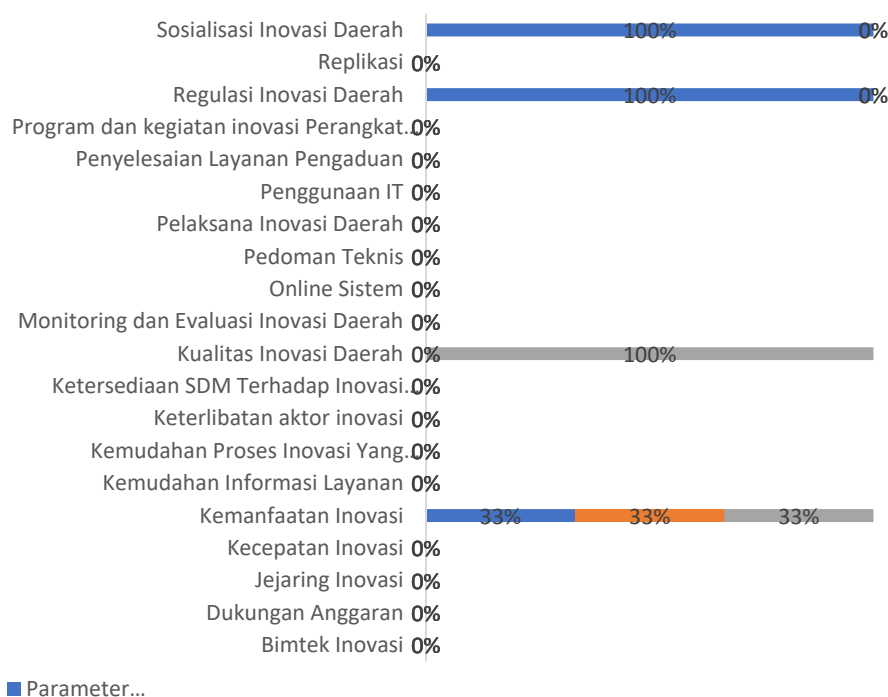
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 93% sedangkan 7% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Kemanfaatan Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 60% artinya 3 dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Beberapa indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung 0% adalah indikator Replikasi, Program dan Kegiatan Inovasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi, Ketersediaan SDM, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan, Kecepatan, Jejaring, Dukungan Anggaran dan Bimtek Inovasi, artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

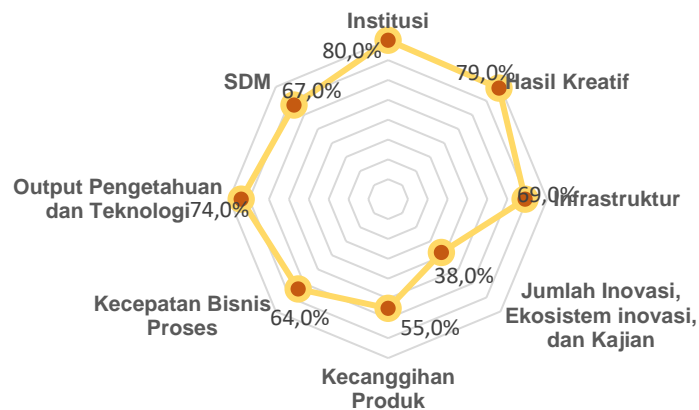
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemanfaatan Inovasi, sebesar 33% artinya 33% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kemanfaatan Inovasi termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi dan Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Sosialisasi dan Regulasi Inovasi Daerah.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Nama Inovasi	Skor Kematangan
TRANSPORTASI UMUM BEBAS COVID-19	0
Rumah Tunggu Kelahiran	5
Desa Berjaga (Desa Berjamban Keluarga)	17
Pakan Ternak Tanimbar Cerdas (PT2C)	15
"LIKE FROM DANGER RESEP" (LINDUNGI KELUARGA DARI BAHAYA RESIDU PUPUK DAN PESTISIDA)	10

H. KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Seram Bagian Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 80,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 38% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat

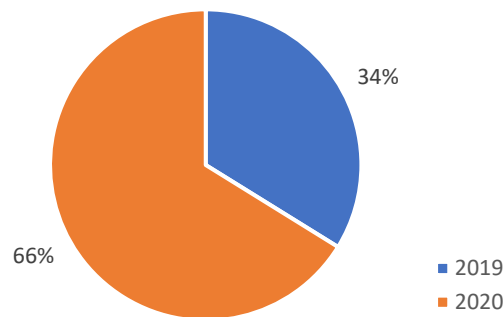
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perkembangan meskipun belum begitu signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu sebesar 0,07%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik 0,07%, namun hal ini sudah sesuai dengan standart parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator lain yang juga mengalami penurunan yaitu indikator Penurunan Angka Kemiskinan

yang turun sebesar 0,05% yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,05% dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,13%, dimana nilai tersebut juga sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami kenaikan sebesar 12,33% dimana nilai tersebut juga tidak lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD naik sebesar 2,27% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%, indikator Jumlah Investasi naik sangat signifikan sebesar 183,93% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%. Begitu pula indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang juga mengalami kenaikan sebesar 0,08% yang dimana nilai tersebut memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

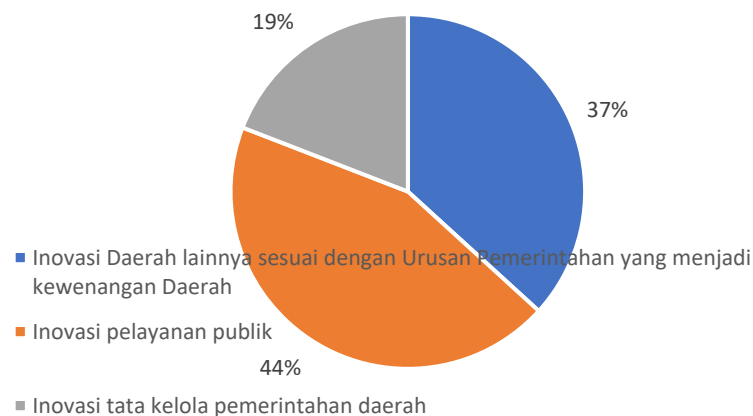
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebesar 45 (66,18%) inovasi dari 68 inovasi. Sisanya sebesar 23 (33,82%) inovasi diterapkan di tahun 2019.

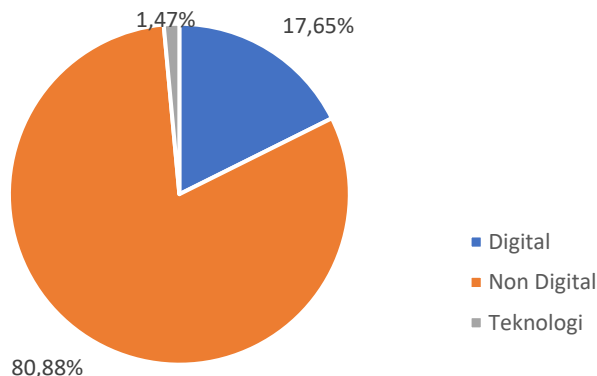
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar bentuk inovasi di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu inovasi Pelayanan Publik yaitu sebesar 44,12%, inovasi daerah sesuai dengan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebesar 36,76% dan sisanya inovasi bentuk tata kelola pemerintahan daerah sebesar 19,12%.

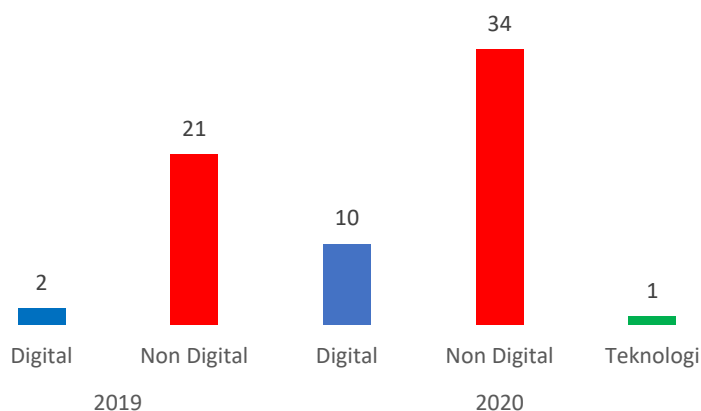
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 12 (17,65%) dari 68 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan inovasi digital, sebanyak 55 (80,88%) merupakan inovasi non digital dan 1 (1,47%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

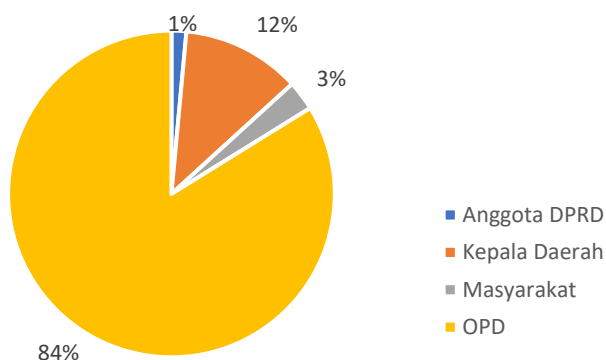
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Seram Barat

Secara umum jumlah inovasi di Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, inovasi non digital, maupun inovasi teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 banyaknya inovasi yang diterapkan sebanyak 2 inovasi dan pada tahun 2020 naik menjadi 10 inovasi. Inovasi non digital mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 jumlah inovasi yang diterapkan sebanyak 21 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 34 inovasi, begitu pula untuk inovasi teknologi yang juga mengalami kenaikan di mana pada tahun 2019 tidak ada inovasi yang diterapkan namun pada tahun 2020 menjadi 1 inovasi yang diterapkan.

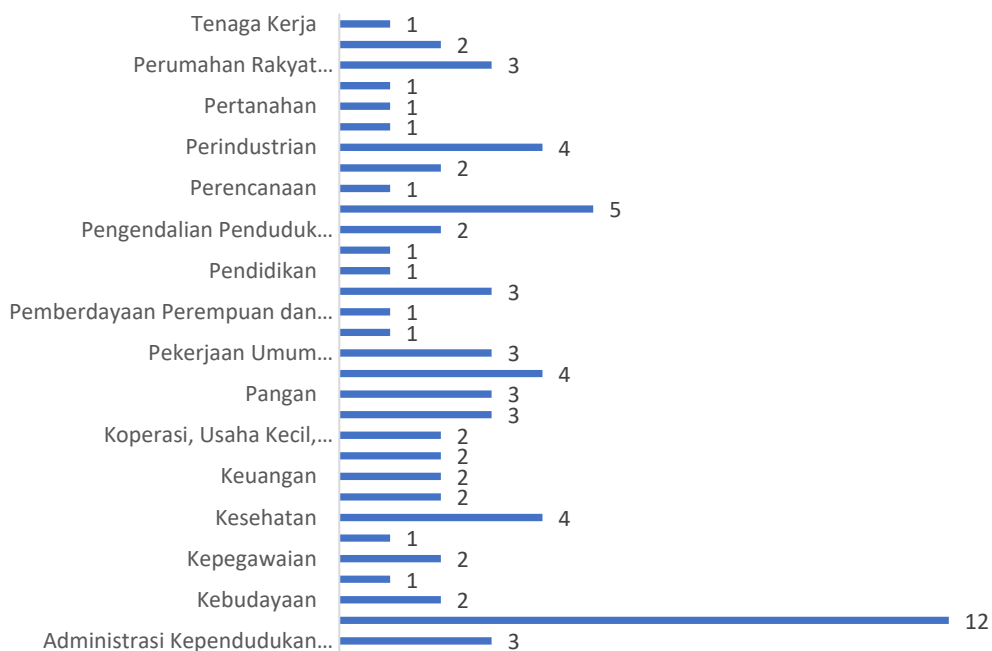
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD) yaitu sebanyak 57 (83,82%). Sebanyak 8 (11,76%) diinisiasi oleh Kepala Daerah, sebanyak 2 (2,94%) inovasi diinisiasi oleh masyarakat dan sisanya 1 (1,47%) inovasi diinisiasi oleh Anggota DPR.

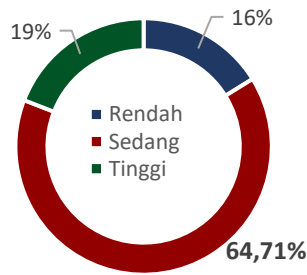
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Seram Bagian Barat

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan urusan pemerintahan terlihat fluktuatif. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan fungsi dibidang lainnya dengan 12 inovasi dari 68 inovasi. Inovasi yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan yaitu inovasi di bidang sosial sebanyak 2 inovasi, inovasi bidang pendidikan sebanyak 1 inovasi, di bidang perumahan rakyat sebanyak 3 inovasi, bidang pekerjaan umum sebanyak 3 inovasi, bidang ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 2 inovasi, dan bidang kesehatan sebanyak 4 inovasi.

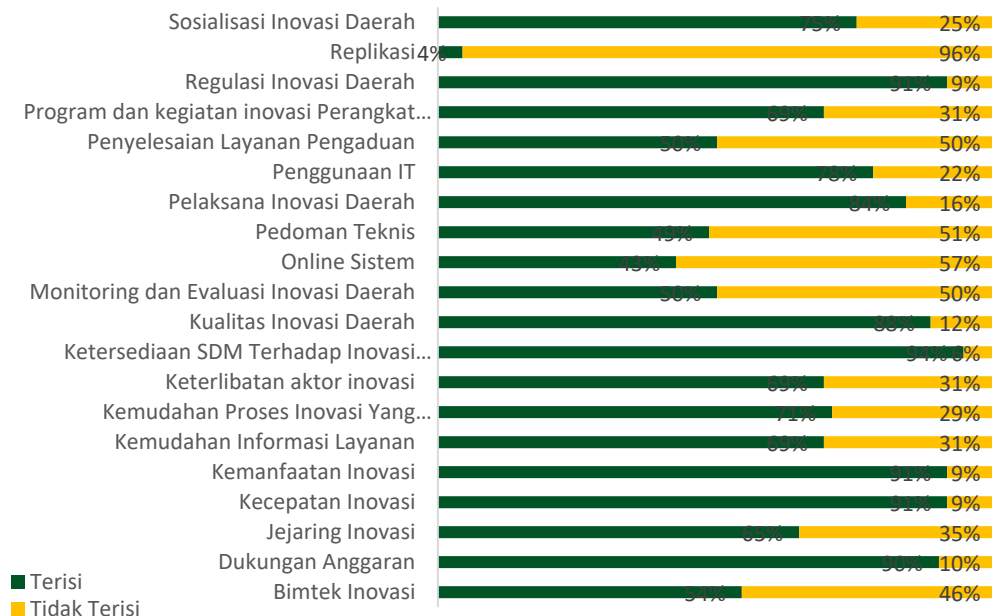
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Seram Bagian Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi di Kabupaten Seram Bagian Barat masih mencapai skor kematangan sedang, yaitu sejumlah 44 (64,71%) inovasi. Sebanyak 13 (19,12%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, sedangkan 11 (16,18%) masih mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

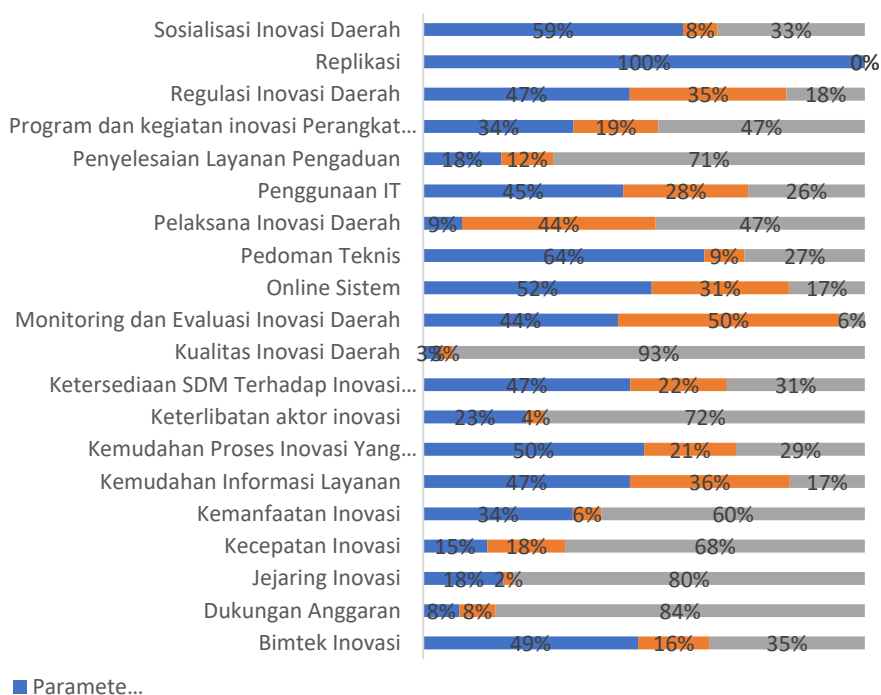


Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Dari 68 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 31,25% sedangkan 68,75% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator

Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 94% artinya 64 dari 68 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 4%, artinya 3 dari 68 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, yaitu sebesar 93%, artinya 93% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, sebesar 50% artinya 50% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Seram Bagian Barat beserta Skor Kematangannya

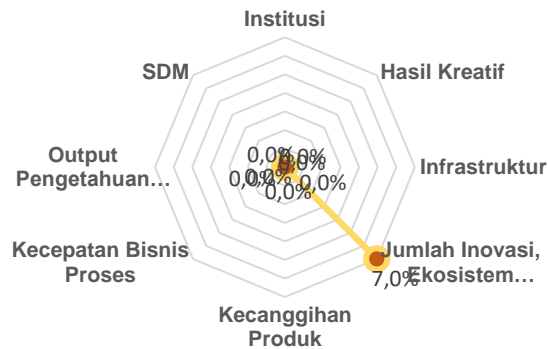
Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Seram Bagian Barat

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi Daerah Pencegahan Covid -19 pada Sektor Pasar Tradisional	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid - 19 pada Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid - 19 pada Sektor Perhotelan	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid - 19 pada Sektor Tempat Wisata	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid - 19 pada Sektor Transportasi Umum	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid -19 pada Sektor Restoran	15
SASI	68
ASA-SIMPEG	107
BATIK SAKA MESE NUSA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	90
PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH	100
Sidang MP - TPTGR	87
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut (Transplantasi Terumbu Karang)	89
QR CODE FORMULIR	69
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	107
FORMULIR GOOGLE FORM	71
Pelatihan Tata Kelola Destinasi: Tingkatkan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kepariwisata	79
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	123
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	68
peningkatan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	87
Pendataan dan Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Seram Bagian Barat	71
LOMBA INOVASI DESA DALAM PENERAPAN NEW NORMAL LIFE PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	107
Pembangunan Tangki Septic Komunal 5-10 KK Desa Seruawan	95
Pengembangan Jaringan Desa Piru	88
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020, Yang Kemudian Di Input ke Dalam Aplikasi E-SAKIP Untuk Menyusun Database perencanaan Daerah yang Lengkap, Akurat dan Terintegrasi.	78
Festival Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	81
Jaringan Point To Multi Point Antar OPD Tahun 2019	76

Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik Tahun 2020	76
Pembinaan dan Pemantauan Evaluasi BUMDes	79
evaluasi pengawasan percepatan realisasi anggaran	63
Pembangunan Tambatan perahu Desa Loki	96
ARIKA KONVERGENSI PELE STUNTING	106
SELEKSI PASKIBRAKA DAERAH (SEPADA)	98
Tera dan Tera Ulang (Kemetrologian)	85
Pemberian Hewan Kurban Keagamaan	22
PENYALURAN BANTUAN SEMBAKO PADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN SBB	61
Pasar Murah	90
Pembangunan Koridor/Selasar Ruangan Isolasi Covid 19 di Rumah Sakit Umum Daerah Piru	55
Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Mandiri	74
Gerakan Masyarakat Sadar Pajak	118
RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	0
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	103
VISUALISASI FILM DOKUMENTER MENUJU PERUBAHAN GELORA KASE BAE SERAM BAGIAN BARAT	86
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	89
Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) Pada Ternak Sapi di Kab. SBB	100
Potong Pele Stunting	106
PENERAPAN PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE BAGI PELAKU USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	95
Penerapan penanganan penyebaran COVID 19	110
Promosi Potensi Wisata Daerah Dalam APKASI Otonomi Expo Tahun 2019 (AOE19)	93
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	80
Pelatihan Berbasis Hasil Olahan Kelapa di Kecamatan Taniwel	85
Pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi 2019	77
Pembuatan Perda Kepariwisata dan Perda RIPPDA Tahun 2016-2036	102
Distribusi Alat Kontrasepsi	75
Partisipasi Kabupaten Sebagai Perwakilan Provinsi Maluku pada Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Nasional	79
Pelayanan Dokumen Kependudukan	82
Focus Group Discussion Pengolahan Minyak Atsiri Pasca New Normal Life di Kec Seram Barat dan Waesala	89
Pelatihan Peningkatan Kapasitas IKM Olahan Kelapa Pasca New Normal Life di Kecamatan Taniwel	81
kesiapsiagaan terhadap bencana alam	108
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	50

Pembentukan Pos Penanganan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Oleh Dinas Satpol PP	57
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Jenjang SD Dan SMP	65
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK)	76
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	80
Perekaman KTP E Kecamatan Elpaputih	15
Program Keluarga Harapan (PKH)	74
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	0

I. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Seram Bagian Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian yaitu 7.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sedangkan skor untuk variabel lainnya seperti SDM, Institusi, Hasil Kreatif, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi memiliki capaian skor 0%, yang artinya indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

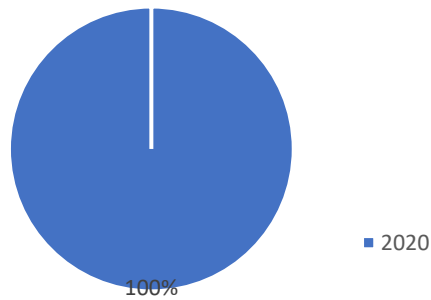


Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Timur tidak mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan tidak ada penurunan maupun peningkatan terhadap beberapa aspek satuan pemerintah daerah diantaranya yaitu aspek Tingkat Pengangguran Terbuka, indikator Penurunan Angka Kemiskinan, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, indikator Jumlah Peningkatan PAD, indikator Jumlah Investasi dan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita. Hal ini berarti tidak ada perbaikan nilai dari tahun sebelumnya.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

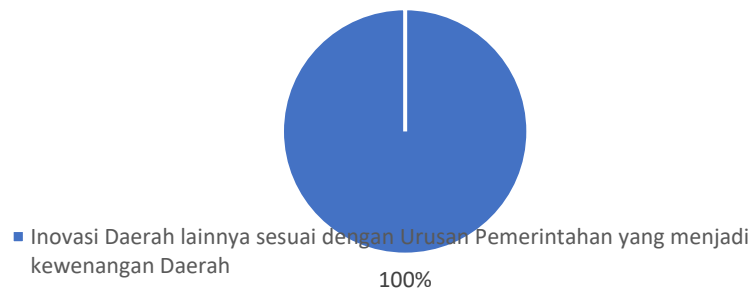
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Seram Bagian Timur diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebanyak 1 inovasi dan tidak ada inovasi yang ditetapkan sejak tahun 2019.

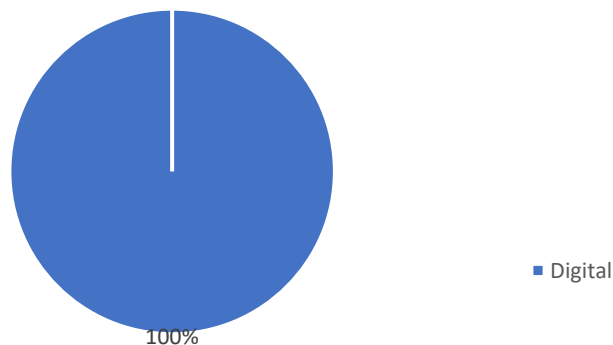
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Berdasarkan bentuk inovasi, semua inovasi di Kabupaten Seram Bagian Timur berupa inovasi daerah sesuai dengan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebanyak 1 inovasi.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, semua inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan inovasi digital.

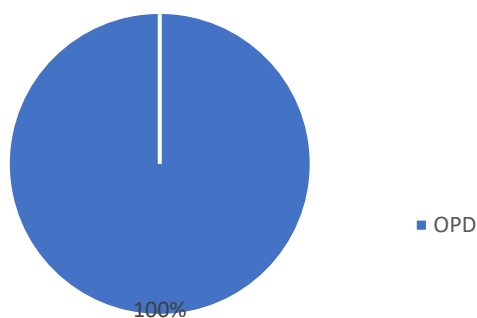
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Seram Timur

Secara umum jumlah inovasi di Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 khususnya untuk inovasi dalam bentuk digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 tidak ada inovasi yang diterapkan namun pada tahun 2020 naik menjadi 1 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2020 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD) yaitu sebanyak 1 (100%) inovasi.

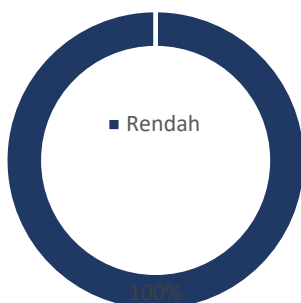
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Seram Bagian Timur

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan urusan pemerintahan terlihat hanya terdapat 1 urusan yaitu urusan perencanaan sebanyak 1 inovasi. Tidak terdapat urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan pada Kabupaten Seram Bagian Timur.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Seram Bagian Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi di Kabupaten Seram Bagian Timur masih mencapai skor kematangan rendah, yaitu sejumlah 1 (100%) inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

TIDAK MUNCUL GAMBAR

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

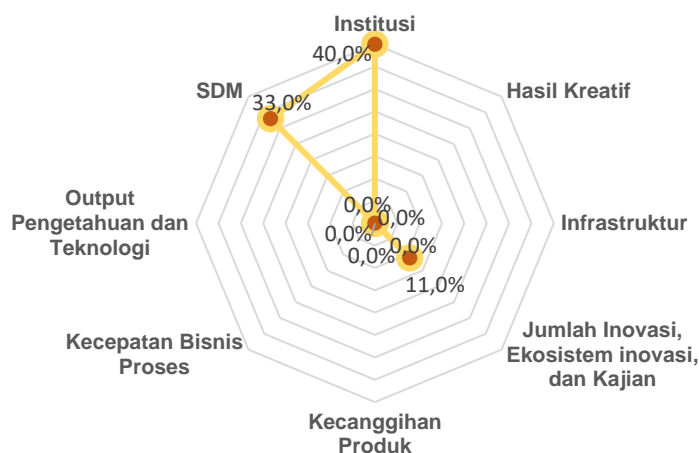
TIDAK MUNCUL GAMBAR

j. Daftar Inovasi Kabupaten Seram Bagian Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Seram Bagian Timur

Nama Inovasi	Skor Kematangan
BMW (Bapeda Nadudu Wanu	0

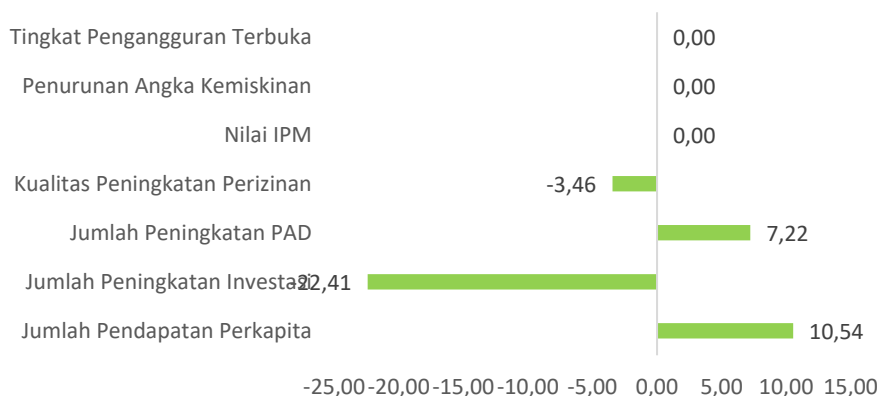
J. KOTA AMBON



Gambar 87. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kota Ambon

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Ambon memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi yaitu 40.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sedangkan skor untuk beberapa variabel lainnya seperti Hasil Kreatif, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi memiliki capaian skor 0%, yang artinya indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 88. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Ambon

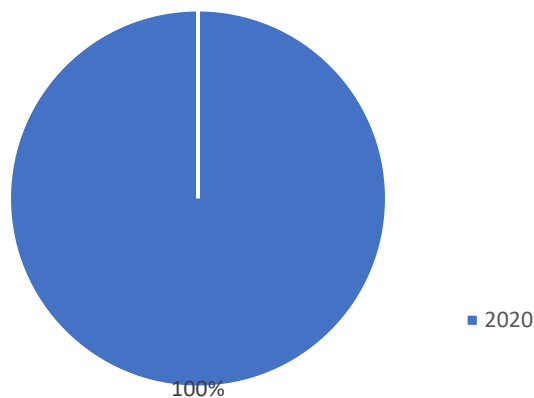
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Ambon belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya angka yang tetap (tidak mengalami penurunan maupun peningkatan) pada indikator Tingkat Pengangguran terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, serta Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 3,46% dimana nilai tersebut juga tidak lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Investasi yang mengalami penurunan sebesar 22,41% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%

Jumlah Peningkatan PAD meningkat sebesar 7,22% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Terakhir, Jumlah Pendapatan Perkapita yang juga mengalami kenaikan sebesar 10,54% yang dimana nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 89. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Ambon

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, semua inovasi yang dilaporkan oleh Kota Ambon diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebanyak 6 (100%) inovasi.

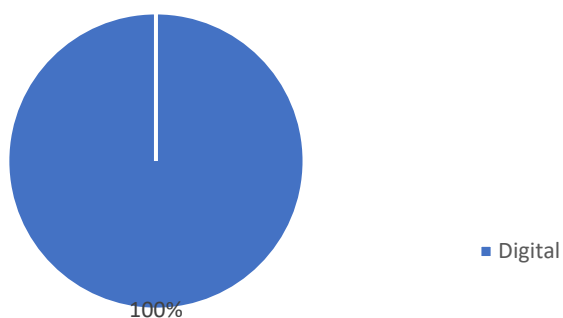
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 90. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Ambon

Berdasarkan bentuk inovasi, semua bentuk inovasi di Kota Ambon yaitu inovasi daerah sesuai dengan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebanyak 6 inovasi (100%).

c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Ambon

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, semua inovasi daerah yang dilaporkan Kota Ambon merupakan inovasi digital, yaitu sebanyak 6 (100%) inovasi.

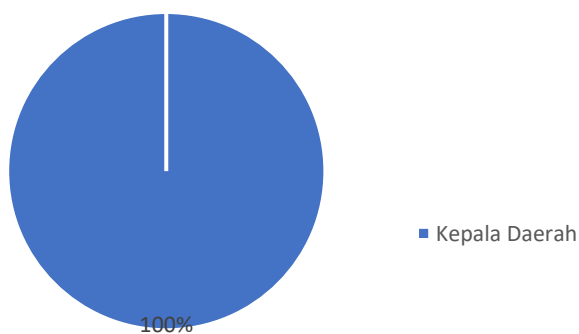
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 92. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Kota Ambon

Secara umum jumlah inovasi di Kota Ambon mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 tidak ada inovasi yang diterapkan sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 6 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Ambon

Semua inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Ambon pada tahun 2020 diinisiasi oleh Kepala Daerah yaitu sebanyak 6 (100%) inovasi.

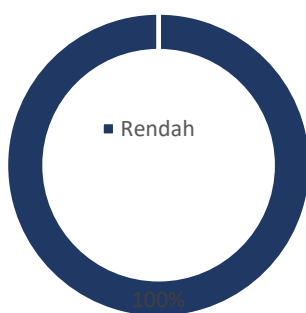
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 94. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Ambon

Sebaran inovasi daerah pada Kota Ambon berdasarkan urusan pemerintahan terlihat bahwa terdapat dua urusan dari sebanyak 6 inovasi yang dilaporkan, yaitu urusan perdagangan sebanyak 4 inovasi dan urusan pariwisata sebanyak 2 inovasi. Tidak terdapat urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan oleh Kota Ambon.

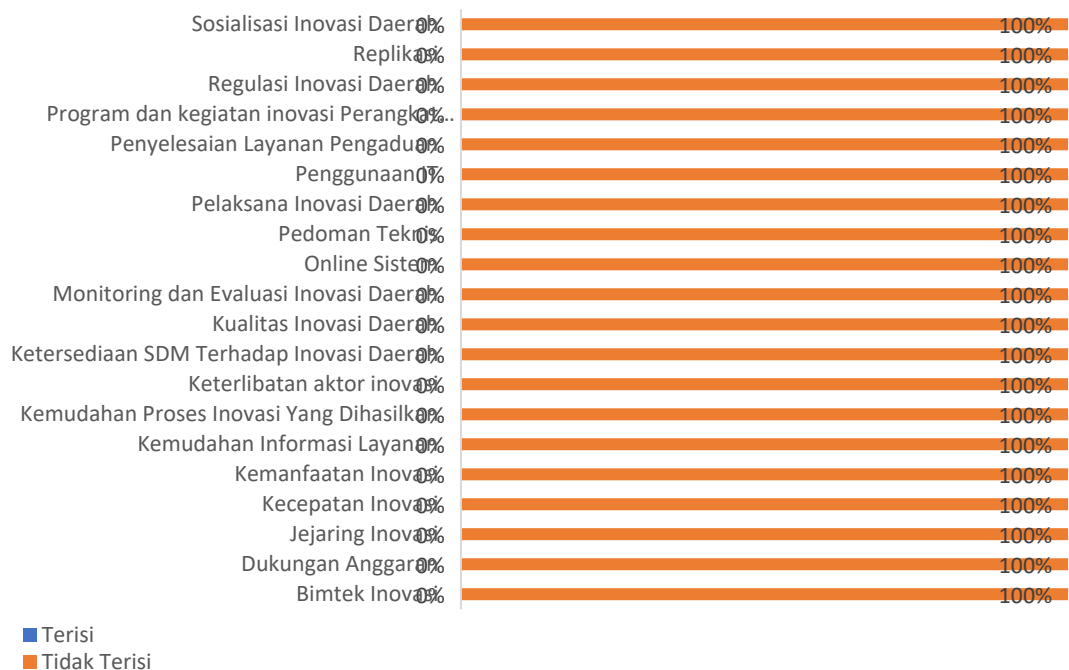
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Ambon

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi di Kota Ambon masih mencapai skor kematangan rendah, yaitu sejumlah 6 (100%) inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

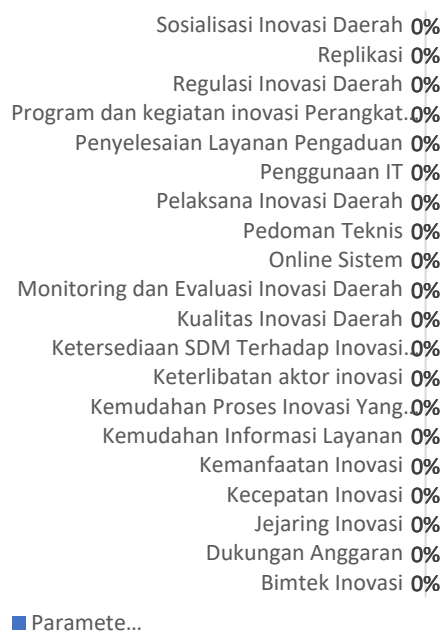
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 96. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Ambon

Dari 6 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Ambon, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100% dan 0% lainnya telah terisi data pendukung. Hal ini berarti bahwa semua indikator satuan inovasi daerah tidak terisi data pendukung.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 97. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

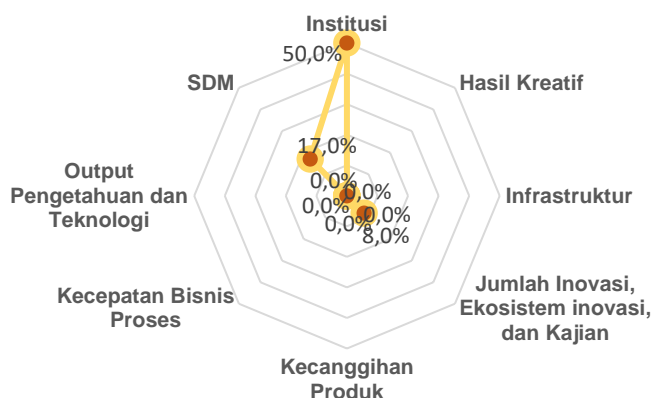
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa tidak ada indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga), parameter 2 (dua), maupun parameter 1 (satu). Hal ini berarti sebanyak 0% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator dalam kategori parameter ketiga, parameter kedua, maupun parameter 1 (satu).

j. Daftar Inovasi Kota Ambon beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kota Ambon

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Hotel yang nyaman, aman dan produktif di Kota Ambon	0
Hotel yang nyaman, aman dan produktif di Kota Ambon	0
Pasar Tradisional dalam Genggaman	0
Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro dalam Genggaman	0
Mari Kita Berbelanja Online	0
Pengusaha Produktif di Pandemi Covis-19	0

K. KOTA TUAL



Gambar 98. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kota Tual

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Tual memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi yaitu 50%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sedangkan skor untuk beberapa variabel lain seperti Hasil Kreatif, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi memiliki capaian skor 0%, yang artinya indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 99. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tual

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tual belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya angka yang tetap (tidak mengalami peningkatan maupun penurunan) pada indikator Tingkat Pengangguran terbuka, Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Peningkatan PAD, dan indikator Jumlah Peningkatan Investasi.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,17%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan sebesar 82,13% dimana nilai tersebut lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Sebaliknya, Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 12,50% yang dimana nilai tersebut tidak lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

TIDAK MUNCUL GAMBAR

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

TIDAK MUNCUL GAMBAR

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

TIDAK MUNCUL GAMBAR

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

TIDAK MUNCUL GAMBAR

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

TIDAK MUNCUL GAMBAR

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

TIDAK MUNCUL GAMBAR

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

TIDAK MUNCUL GAMBAR

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

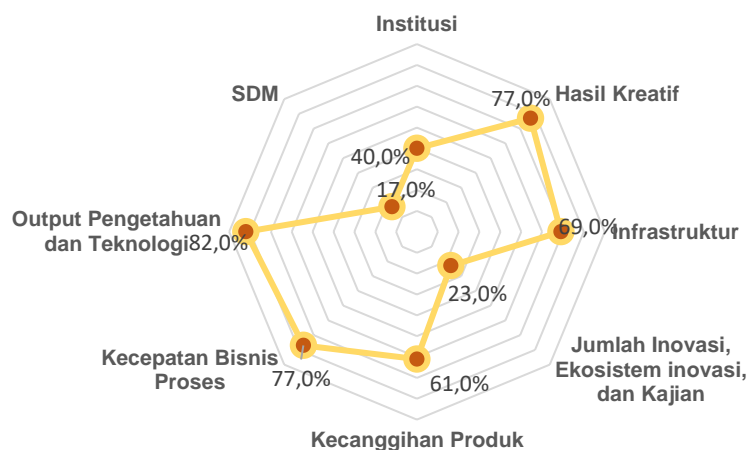
TIDAK MUNCUL GAMBAR

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

TIDAK MUNCUL GAMBAR

j. Daftar Inovasi Kota Tual Beserta Skor Kematangannya

L. PROVINSI MALUKU



Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Provinsi Maluku memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi yaitu 82.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sedangkan variabel SDM memiliki capaian skor 17.0%, yang artinya indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

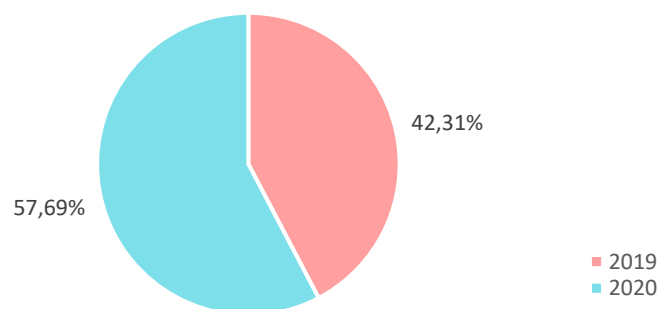


Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku tidak mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan tidak ada penurunan maupun peningkatan terhadap beberapa aspek satuan pemerintah daerah diantaranya yaitu aspek Tingkat Pengangguran Terbuka, indikator Penurunan Angka Kemiskinan, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, indikator Jumlah Peningkatan PAD, indikator Jumlah Investasi dan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita. Hal ini berarti tidak ada perbaikan nilai dari tahun sebelumnya.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

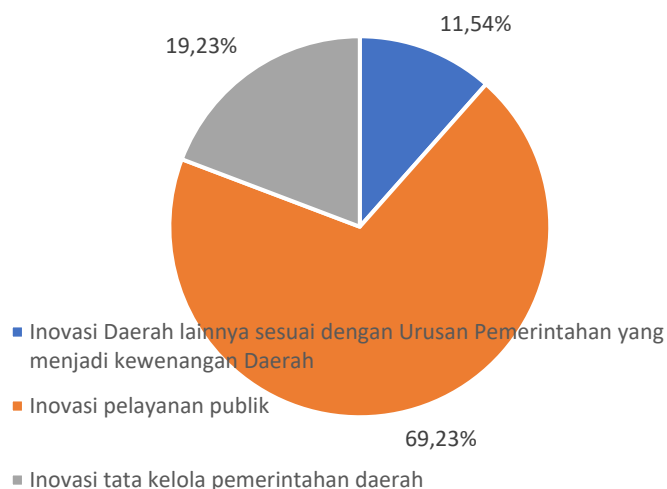
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Provinsi Maluku

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebanyak 15 (57,69%) inovasi, dan sisanya sebanyak 11 (42,31%) inovasi diterapkan sejak tahun 2019.

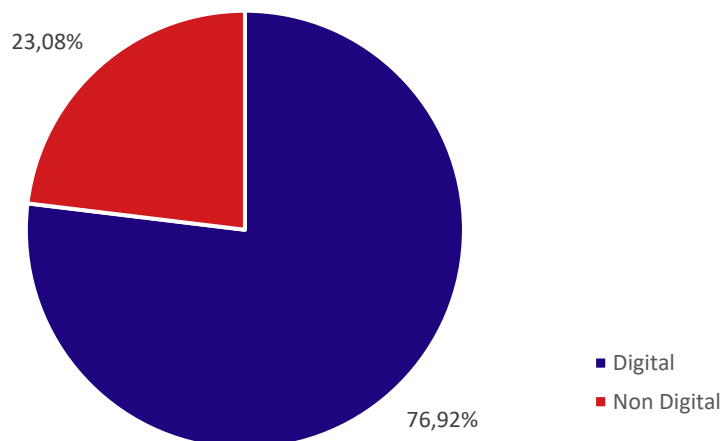
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Provinsi Maluku

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar bentuk inovasi di Provinsi Maluku yaitu inovasi Pelayanan Publik yaitu sebanyak 18 (69,23%) inovasi, disusul dengan inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebanyak 5 (19,23%) inovasi, dan sisanya sebanyak 3 (11,54%) inovasi merupakan inovasi daerah sesuai dengan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

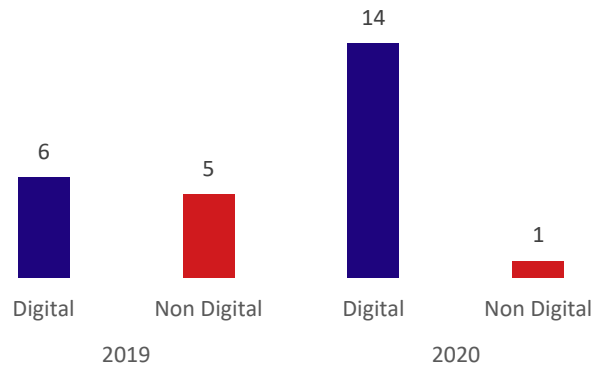
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Provinsi Maluku

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan Provinsi Maluku merupakan inovasi digital, yaitu sebanyak 20 (76,92%) inovasi. Sedangkan sisanya sebanyak 6 (23,08%) inovasi merupakan inovasi non digital.

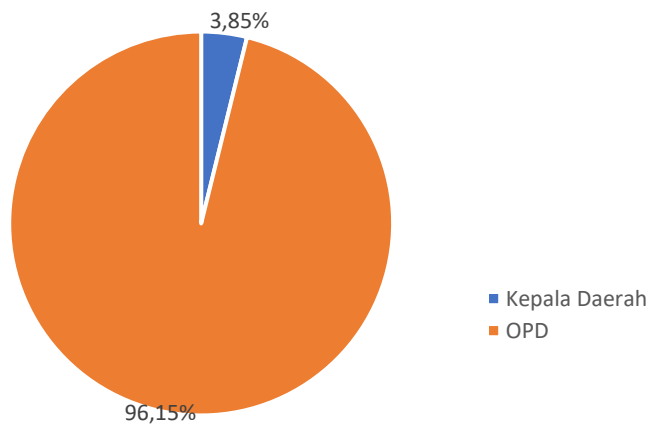
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Provinsi Maluku

Secara umum jumlah inovasi di Provinsi Maluku mengalami kenaikan atau penurunan yang fluktuatif dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 terdapat 6 inovasi yang diterapkan dan pada tahun 2020 naik menjadi 14 inovasi. Sedangkan untuk inovasi non digital menurun di mana pada tahun 2019 terdapat 5 inovasi yang diterapkan namun pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi.

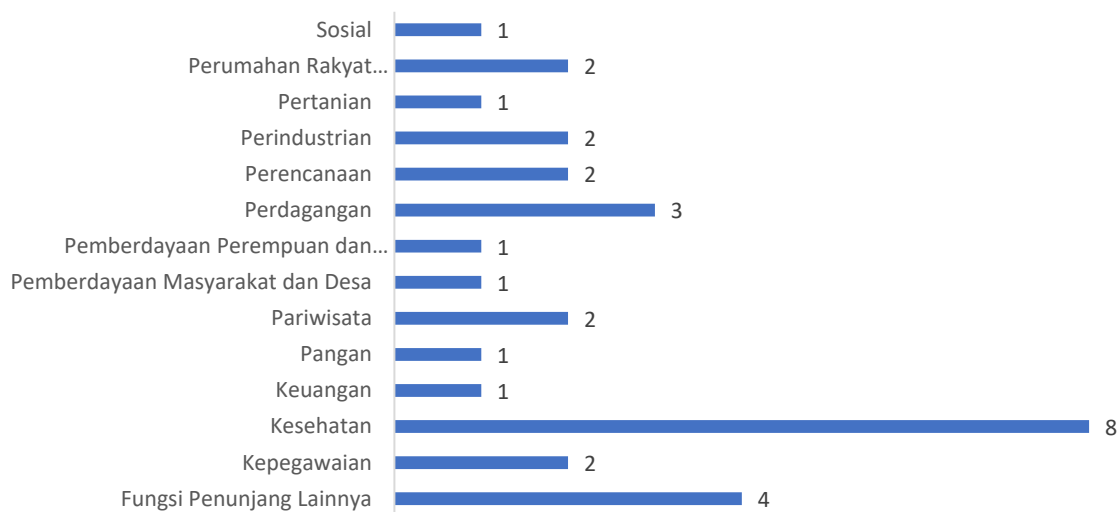
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Provinsi Maluku

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku pada tahun 2020 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD) yaitu sebanyak 25 (96,15%) inovasi, dan sisanya sebanyak 1 (3,85%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah.

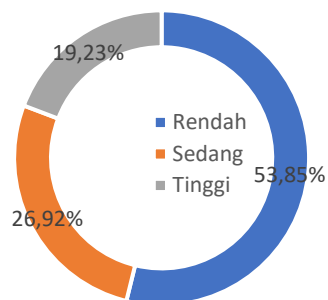
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Provinsi Maluku

Sebaran inovasi daerah pada Provinsi Maluku berdasarkan urusan pemerintahan terlihat fluktuatif. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 8 inovasi dari 26 inovasi. Beberapa inovasi merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan yaitu inovasi urusan sosial sebanyak 1 inovasi, urusan kesehatan sebanyak 8 inovasi, dan perumahan rakyat sebanyak 2 inovasi.

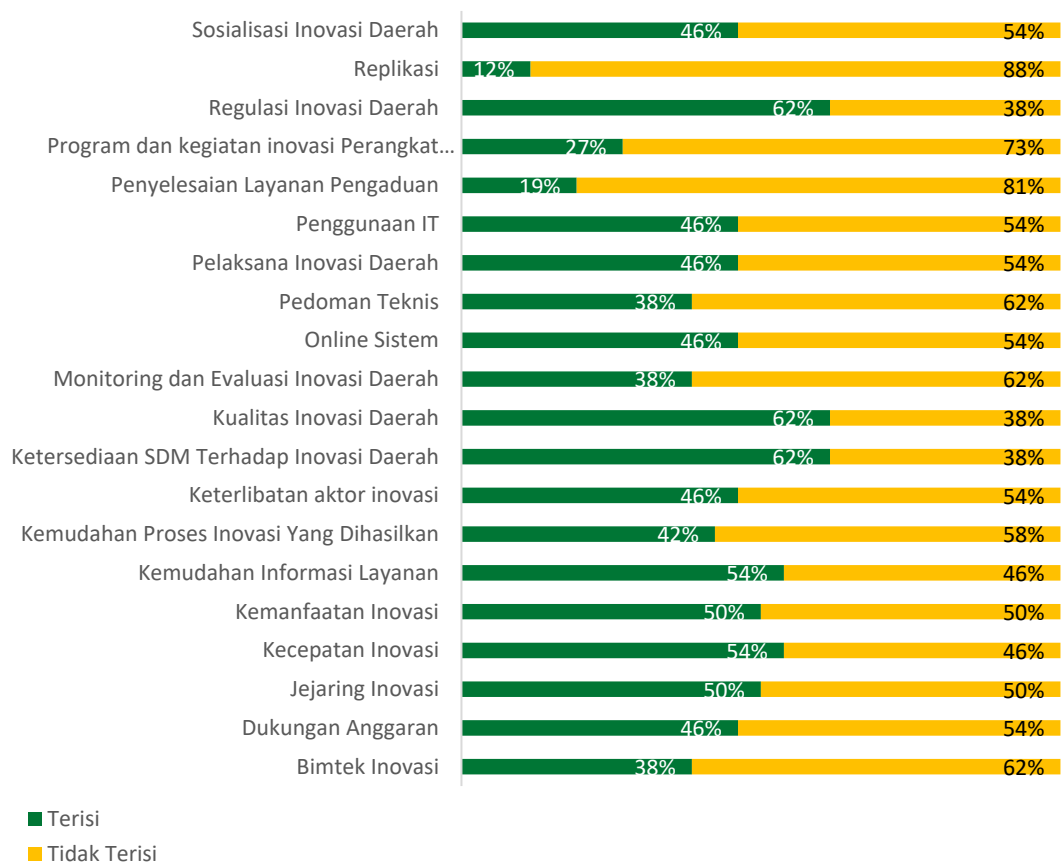
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Provinsi Maluku

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi di Provinsi Maluku masih mencapai skor kematangan rendah, yaitu sejumlah 14 (53,85%) inovasi, sebanyak 7 (26,92%) inovasi mencapai skor kematangan sedang dan sisanya sebanyak 5 (19,23%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

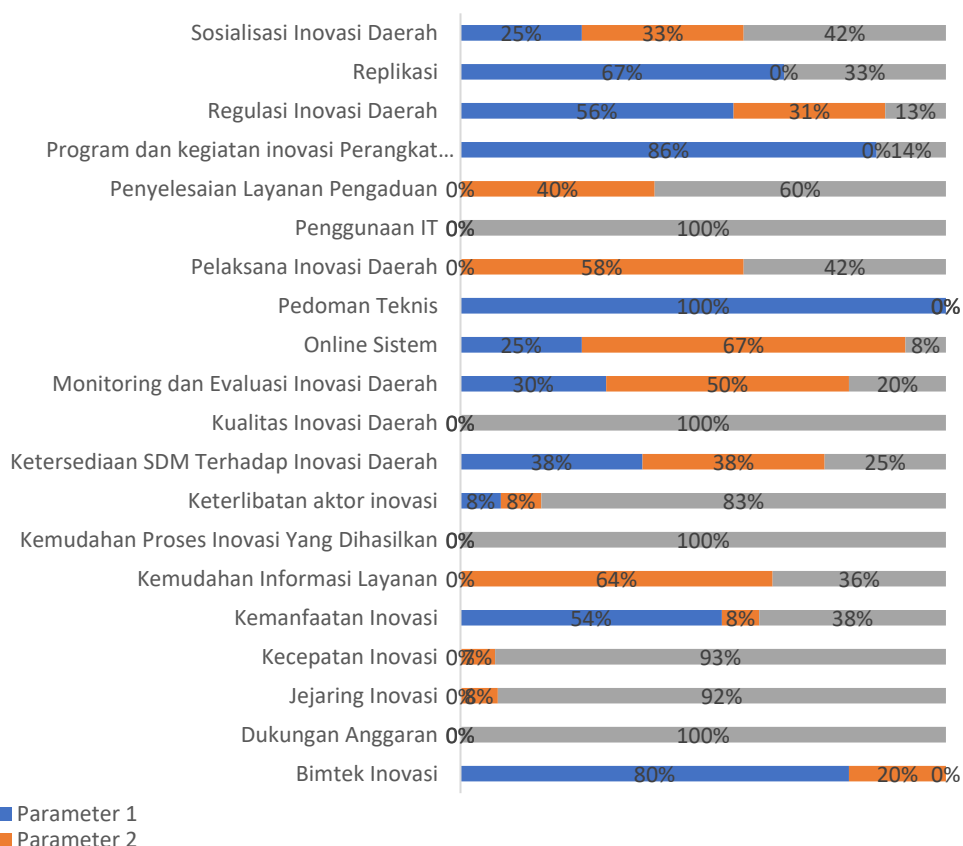
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku

Dari 26 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 55,77% dan 44,23% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi, Kualitas Inovasi, dan Ketersediaan SDM merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 62% artinya 16 dari 26 inovasi yang dilaporkan oleh Provinsi Maluku telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 12%, artinya 3 dari 26 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi, dan Dukungan Anggaran, yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi, dan Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem, sebesar 67% artinya 67% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Online Sistem termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Pedoman Teknis.

j. Daftar Inovasi Provinsi Maluku beserta Skor Kematangannya

Tabel 11. Daftar Inovasi Provinsi Maluku

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Menjangkau Yang Tidak Terjangkau dengan SMS (Scilling Medical Service)	0
Surat Masuk Cerewet (Cepat Respon, Tepat Waktu, Enteng Tugas)	15
Pelayanan Drive Thru	0

ASIK (ASN berbasis bukti)	0
SIPELANGI (Strategi Pengawasan, Pelaporan Perlindungan Konsumen Berbasis Aplikasi Android)	97
SMART SERVICE	0
E-OFFICE	45
SIMPONI INDAG (Sistem Promosi dan Pemasaran Produk IKM)	0
KPKP (Klinik Perumahan Kawasan Permukiman)	0
Duta Perangi Stunting (Duta Parenting)	124
RBS (Rumah Basudara Sejahtera)	36
BARACI SAGU (Bincang Rancangan Retribusi Sambil Minum Air Guraka)	83
Walang Kesehatan	98
SAMA THUKEL (Samsat Mall, Drive Thru, Keliling dan Elektronik)	120
Early Information System 247 (Pelayanan 24 Jam 7 Hari Seminggu)	79
BACARI (Baca Cari Informasi Hukum)	107
SASAPU LIDI (SADAR AKAN SERTIFIKAT AMAN PANGAN BERMUTU UNTUK LINDUNGI DIRI)	101
MENJANGKAU YANG TIDAK TERJANGKAU DENGAN SAILING MEDICAL SERVICE (SMS)	0
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN / SIMPEG	69
Sistem Informasi Gugus Pulau Kesehatan	123
SIPANDAN " SAHABAT PETANI" SISTIM INFORMASI PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH.	86
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan melalui Kunjungan Rumah/Home Visite	47
Tim Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Maluku	0
Counter bandara	0
SISTEM INFORMASI PERKEMBANGAN INDIKATOR DAERAH	65
BAILEO MALUKU (Basis Data dan Informasi Lingkup Perumahan Permukiman Provinsi Maluku)	43

The Page Left is Blank



BAB III

PEMBAHASAN REKOMENDASI

Pada Provinsi Maluku terdapat 11 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. KABUPATEN BURU

Kabupaten Buru memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 44,05 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Sulawesi Utara juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Buru melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

B. KABUPATEN BURU SELATAN

Kabupaten Buru Selatan memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 7,00 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Maluku dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Buru Selatan melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

C. KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 11,40 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Maluku dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kepulauan Aru melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

D. KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 18,92 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Maluku dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Maluku Barat Daya melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

E. KABUPATEN MALUKU TENGAH

Kabupaten Maluku Tengah memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 54,20 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Maluku juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Maluku Tengah melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

F. KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 13,69 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Maluku dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Maluku Tenggara melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

G. KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 13,36 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Maluku dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

H. KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 52,56 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Maluku juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Seram Bagian Barat melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

I. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 1,28 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Maluku dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Seram Bagian Timur melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

J. KOTA AMBON

Kota Ambon memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 10,08 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Maluku dapat melakukan pembinaan kepada Kota Ambon melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

K. KOTA TUAL

Kota Tual memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 11,00 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Maluku dapat melakukan pembinaan kepada Kota Tual melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.